



LAPORAN KEUANGAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
(GABUNGAN)

PER 31 DESEMBER 2025

AUDITED

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 31 Desember 2025 (*Audited*). Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini disusun sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrual dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun telah berupaya menyusun dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku, kami menerima masukan dan komentar konstruktif dari berbagai pihak agar Laporan Keuangan yang kami buat kedepan semakin baik.

Jakarta, 21 Mei 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	viii
LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2025 (AUDITED).....	ix
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai	7
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	15
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	17
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	32
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	33
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	33
4.2 Neraca	41
4.3 Laporan Operasional	58
4.4 Laporan Perubahan Ekuitas	66
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	67
5.1 Struktur Organisasi	68
5.2 Visi Dan Misi.....	74
5.3 Tugas dan Fungsi.....	75
5.4 Tujuan dan Sasaran Strategis	80
5.5 Target Kinerja Strategis	81
5.6 Penghargaan yang Diterima	82
BAB VI PENUTUP	82
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran	7
Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama	8
Tabel 2.2. 1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis	11
Tabel 2.2. 2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan	13
Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Anggaran	33
Tabel 4. 2 Rincian Belanja Daerah	35
Tabel 4. 3 Rincian Belanja Operasi	36
Tabel 4. 4 Rincian Belanja Modal	37
Tabel 4. 5 Neraca	41
Tabel 4. 6 Rincian Aset	43
Tabel 4. 7 Rincian Aset Lancar	44
Tabel 4. 8 Rincian Aset Tetap	44
Tabel 4. 9 Rincian Aset Lainnya	49
Tabel 4. 10 Rincian Utang Belanja	54
Tabel 4. 11 Laporan Operasional	59
Tabel 4. 12 Rincian Pendapatan	60
Tabel 4. 13 Rincian Beban	61
Tabel 4. 14 Laporan Perubahan Ekuitas	66
Tabel 5. 1 Target Kinerja Strategis	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Realisasi Belanja Daerah	35
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	71
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka	92
Lampiran 2 Rekapitulasi Persediaan	94
Lampiran 3 Rekapitulasi Aset Rusak Berat	94
Lampiran 4 Rekapitulasi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	98



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 21 Mei 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan





LAPORAN KEUANGAN

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
(GABUNGAN)**

Per 31 Desember 2025
Audited



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	4.1.2.1.a)	434.020.906.001,00	369.440.643.783,00	85,12	377.000.582.906,00
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.b)	823.666.470.983,00	798.194.168.697,00	96,91	761.534.465.186,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	4.1.2.1	1.257.687.376.984,00	1.167.634.812.480,00	92,84	1.138.535.048.092,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	4.1.2.2.a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.b)	27.800.488.875,00	26.921.721.120,00	96,84	12.871.656.458,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.c)	586.577.426,00	517.470.900,00	88,22	27.984.767.800,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.1.2.2.d)	11.266.658,00	11.122.200,00	98,72	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.e)	17.896.561,00	17.454.750,00	97,53	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	4.1.2.2.f)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	4.1.2.2	28.416.229.520,00	27.467.768.970,00	96,66	40.856.424.258,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	4.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	4.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	4.1.2	1.286.103.606.504,00	1.195.102.581.450,00	92,92	1.179.391.472.350,00
SURPLUS / (DEFISIT)	4.1.3	(1.286.103.606.504,00)	(1.195.102.581.450,00)		(1.179.391.472.350,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	4.1.4	0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	4.1.5	(1.286.103.606.504,00)	(1.195.102.581.450,00)		(1.179.391.472.350,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2026
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN
M. ANWAR
NIP. 196603281998031003



NERACA

PER 31 DESEMBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4.2.1.a).1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.2.1.a).1	0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.2.1.a).2	57.013.432,00	30.457.650,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada BLUD		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	4.2.1.a).2	57.013.432,00	30.457.650,00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	4.2.1.a).3	3.560.783.208,00	2.582.667.644,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka	4.2.1.a).3	3.560.783.208,00	2.582.667.644,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan	4.2.1.a).4	8.094.871.764,00	8.639.981.105,00
Barang Pakai Habis	4.2.1.a).4	8.090.327.424,00	8.639.981.105,00
Barang Tak Habis Pakai		4.544.340,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	4.2.1.a)	11.712.668.404,00	11.253.106.399,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal		0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Investasi Dana Abadi Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah	4.2.1.b).1	1.017.634.764.550,00	1.020.268.676.550,00
Peralatan dan Mesin	4.2.1.b).2	240.038.289.527,00	206.635.395.458,00
Gedung dan Bangunan	4.2.1.b).3	1.116.433.785.984,00	1.107.699.324.915,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.1.b).4	819.754.769,00	915.298.169,00
Aset Tetap Lainnya	4.2.1.b).5	1.442.342.692,00	1.436.626.192,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.2.1.b).6	76.525.200,00	76.525.200,00
Akumulasi Penyusutan	4.2.1.b).7	(1.088.507.137.282,00)	(1.050.879.844.621,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.2.1.b).7	(199.527.503.149,00)	(185.204.298.487,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.2.1.b).7	(888.451.212.648,00)	(865.090.252.139,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.1.b).7	(503.420.285,00)	(534.090.095,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.2.1.b).7	(25.001.200,00)	(51.203.900,00)
Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	4.2.1.b)	1.287.938.325.440,00	1.286.152.001.863,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain	4.2.1.c).1	77.525.015.389,00	81.827.227.894,00
Aset Rusak Berat/Usang	4.2.1.c).1.a	76.030.318.384,00	77.700.539.586,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.2.1.c).1.b	1.494.697.005,00	4.126.688.308,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	4.2.1.c).2	(76.794.343.428,00)	(58.382.867.230,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	4.2.1.c).2	(75.306.517.323,00)	(54.264.110.307,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.2.1.c).2	(1.487.826.105,00)	(4.118.756.923,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	4.2.1.c)	730.671.961,00	23.444.360.664,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET	4.2.1	1.300.381.665.805,00	1.320.849.468.926,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga- Meubelair		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja	4.2.2	21.656.365.406,00	21.753.961.139,00
Utang Belanja Pegawai	4.2.2.1	19.904.183.326,00	19.500.810.064,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	4.2.2.2	1.752.182.080,00	2.253.151.075,00
Utang Belanja Barang	4.2.2.2	0,00	17.795.353,00
Utang Belanja Jasa	4.2.2.2	1.752.182.080,00	2.235.355.722,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.2.2	21.656.365.406,00	21.753.961.139,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	4.2.2	21.656.365.406,00	21.753.961.139,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	4.2.3	73.699.486.061,00	102.986.663.503,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	4.2.3	1.205.025.814.338,00	1.196.108.844.284,00
RK PPKD Kas	4.2.3	1.195.102.581.450,00	1.179.391.472.350,00
RK PPKD Non Kas	4.2.3	9.923.232.888,00	16.717.371.934,00
JUMLAH EKUITAS	4.2.3	1.278.725.300.399,00	1.299.095.507.787,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
JUMLAH EKUITAS	4.2.3	1.278.725.300.399,00	1.299.095.507.787,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.2.3	1.300.381.665.805,00	1.320.849.468.926,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2026
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DKI JAKARTA





LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50140000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (Gabungan)
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN					
BEBAN OPERASI	4.3.b.1	1.166.275.172.426,00	1.132.634.831.325,00	33.640.341.101,00	2,97
Beban Pegawai	4.3.b.1.a	369.844.017.045,00	373.623.112.219,00	(3.779.095.174,00)	(1,01)
Beban Barang dan Jasa	4.3.b.1.b	796.431.155.381,00	759.011.719.106,00	37.419.436.275,00	4,93
Beban Barang	4.3.b.1.b.a)	104.458.689.893,00	98.608.080.809,00	5.850.609.084,00	5,93
Beban Jasa	4.3.b.1.b.b)	464.775.396.261,00	635.095.014.348,00	(170.319.618.087,00)	(26,82)
Beban Pemeliharaan	4.3.b.1.b.c)	31.368.675.127,00	25.277.883.869,00	6.090.791.258,00	24,10
Beban Perjalanan Dinas	4.3.b.1.b.d)	60.600.000,00	0,00	60.600.000,00	0,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.3.b.1.b.e)	195.767.794.100,00	30.740.080,00	195.737.054.020,00	636.748,68
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.3.b.2	48.232.278.375,00	43.898.012.631,00	4.334.265.744,00	9,87
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.3.b.2.b.a	13.411.237.236,00	8.197.396.234,00	5.213.841.002,00	63,60
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.3.b.2.b.b	34.185.855.627,00	34.678.452.071,00	(492.596.444,00)	(1,42)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.3.b.2.b.c	40.987.738,00	45.764.908,00	(4.777.170,00)	(10,44)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.3.b.2.b.d	1.143.300,00	0,00	1.143.300,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	4.3.b.2.b.e	593.054.474,00	976.399.418,00	(383.344.944,00)	(39,26)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.3.b.2.b.f	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	4.3.b.2.b.g	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	4.3.b.2.b.h	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	4.3.b.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	4.3.b	1.214.507.450.801,00	1.176.532.843.956,00	37.974.606.845,00	96,87
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	4.3.b	(1.214.507.450.801,00)	(1.176.532.843.956,00)	(37.974.606.845,00)	3,23
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50140000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
NON OPERASIONAL					
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA	4.3.b.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO	4.3.b.5	(1.214.507.450.801,00)	(1.176.532.843.956,00)	(37.974.606.845,00)	3,23

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2026
Walikota
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
M. ANWAR
NIP. 196605281998031003



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (GABUNGAN)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023	4.4	102.986.663.503,00	147.223.032.694,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	4.4	1.196.078.386.634,00	1.132.286.918.109,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	4.4	0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025	4.4	1.299.065.050.137,00	1.279.509.950.803,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023	4.4	1.196.108.844.284,00	1.132.286.918.109,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	4.4	(1.196.078.386.634,00)	(1.132.286.918.109,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025	4.4	30.457.650,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL	4.4	1.299.095.507.787,00	1.279.509.950.803,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO	4.4	(1.214.507.450.801,00)	(1.176.532.843.956,00)
Mutasi RK PPKD	4.4	1.204.995.356.688,00	1.196.108.844.284,00
Koreksi Ekuitas	4.4	(10.858.113.275,00)	9.556.656,00
Jumlah Perubahan Ekuitas	4.4	(20.370.207.388,00)	19.585.556.984,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO	4.4	73.699.486.061,00	102.986.663.503,00
RK PPKD	4.4	1.205.025.814.338,00	1.196.108.844.284,00
EKUITAS AKHIR	4.4	1.278.725.300.399,00	1.299.095.507.787,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN

PROVINSI DKI JAKARTA



NIP. 196605281998031003



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyusun Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (*Audited*) disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. upaya Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. posisi keuangan dan kondisi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. perubahan posisi keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
- n. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 206);
- o. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- q. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua!;
- r. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- s. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

- t. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
- u. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- v. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (*Audited*) dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB III : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB V : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB VI : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 (*Audited*).

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kota Administrasi Jakarta Selatan serta unit kerja gabungan dilingkungannya dengan 76 OPD yaitu Sekretariat Kota, 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.286.103.606.504,00 dan Realisasi pencapaian sebesar Rp1.195.102.581.450,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*Audited*) dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 (*Audited*)**

(dalam rupiah)

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2025 (<i>Audited</i>)	%
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	1.286.103.606.504,00	1.195.102.581.450,00	92,92
BELANJA OPERASI	1.257.687.376.984,00	1.167.634.812.480,00	92,84
Belanja Pegawai	434.020.906.001,00	369.440.643.783,00	85,12
Belanja Barang dan Jasa	823.666.470.983,00	798.194.168.697,00	96,91
BELANJA MODAL	28.416.229.520,00	27.467.768.970,00	96,66
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.800.488.875,00	26.921.721.120,00	96,84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	586.577.426,00	517.470.900,00	88,22
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.266.658,00	11.122.200,00	98,72
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.896.561,00	17.454.750,00	97,53
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(1.286.103.606.504,00)	(1.195.102.581.450,00)	(92,92)
PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
SILPA TAHUN BERKENAAN	(1.286.103.606.504,00)	(1.195.102.581.450,00)	(92,92)

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) periode yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.195.102.581.450,00 atau 92,92% dari total Anggaran Belanja sebesar Rp1.286.103.606.504,00. Dengan demikian Jumlah Anggaran yang belum terealisasi adalah sebesar Rp91.001.025.054,00 atau 7,08%.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.167.634.812.480,00 atau 92,84% dari total Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.257.687.376.984,00 dan Belanja Modal sebesar Rp27.467.768.970,00 atau 96,66% dari total Anggaran Belanja Modal sebesar Rp28.416.229.520,00.

2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

Penyajian capaian perjanjian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan (IKU) yang dijadikan sebagai kinerja tiap semester dijelaskan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Semester II Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata Indikator	Target TW 4	Realisasi TW 4	Satuan	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOTA ADMINISTRASI	Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.	95.61	96.15	Nilai	100.56%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KEGIATAN KEMASYARAKA	Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana	96.8	97.45	Nilai	100.68%

	Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	TAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil				
--	--	--------------------------------	---	--	--	--	--

			capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.				
3	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	INDEKS EFEKTIFITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI	Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi.	95.61	96.15	Nilai	100.46%
4	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	INDEKS EFEKTIFITAS KOORDINASI KOTA ADMINISTRASI	Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing	94.415	94.85	Nilai	100.46%

			Kota/Kabupaten Administrasi.				
Capaian Kinerja Perangkat Daerah						100%	
Predikat Kinerja						Sangat tinggi	

Sumber : Sistem Informasi moneyv kinerja tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel 2.2 Capaian Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Semester II Tahun 2025, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kota administrasi Jakarta Selatan Semester II Tahun 2025 mencapai angka total 100.00% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Hasil capaian atas indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi mencapai 100.56%, dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat juga telah melebihi target yang ditentukan yaitu mencapai 100.68%, sementara capaian Indeks Efektifitas Koordinasi melebihi target yang ditentukan yaitu 100.46%.

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

Berikut ini disajikan data Rekapitulasi Permasalahan Perencanaan dan Pengukuran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Selatan:

Tabel 2.2. 1 Rekapitulasi Permasalahan Perencanaan dan Pengukuran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	100.56%	Nihil
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan	100.68%	Nihil

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan
3	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	100.56%	Nihil
4	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	100.46%	Nihil

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Sebagian besar IKU Kota Administrasi Jakarta Selatan Semester II Tahun 2025 dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan, dan hendaknya hal ini dapat ditingkatkan kembali untuk periode selanjutnya.

2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

Pada bagian ini digambarkan korelasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Serapan Anggaran Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Semester II Tahun 2025. Adapun data yang disajikan adalah periode data mulai 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*). Hasil analisis korelasi antara capaian kinerja program pencapaian kinerja kegiatan capaian kinerja sub kegiatan dan serapan anggaran pada semester II tahun 2025 lalu hasil evaluasi tersebut disajikan pada tabel 2.2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2. 2 Korelasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
dan Serapan Anggaran Semester II Tahun 2025**

Kode	Uraian	Target Tahunan	Kinerja Indikator Program Semester II Tahun 2025			Rata-rata Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan
			Target Semester II	Realisasi Semester II	Capaian Semester II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN							
	INDEKS KEPUASAN TERHADAP PENGELOLAAN KELURAHAN (PENYELENGGA RAAN RT, RW, LMK DAN FKDM)	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PPSU	4	4	4	100.00%			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PKK, POSYANDU, JUMANTIK, DAN RPTRA	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KETERTIBAN UMUM	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
	INDEKS KEPUASAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	PERSENTASE GEDUNG KANTOR DAN RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI DALAM KONDISI BAIK	4	85	85	100.00%			
7.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI							

Kode	Uraian	Target Tahunan	Kinerja Indikator Program Semester II Tahun 2025			Rata-rata Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan
			Target Semester II	Realisasi Semester II	Capaian Semester II			
	NILAI EFEKTIFITAS KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN	92.565	98.565	98.525	106.44%	100.00%	100.00%	100.00%
	NILAI EFEKTIFITAS KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	92.565	90.995	92.885	102.08%			
	NILAI EFEKTIFITAS KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	92.565	89.875	93.13	103.62%			

Sumber: Sistem Informasi monev kinerja 2025, diolah

Berdasarkan data pada tabel 2.2.2 diatas, dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian program, kegiatan dan subkegiatan pada semester II yang diperoleh Kota Administrasi Jakarta Selatan mencapai nilai 100%, hal ini menunjukkan bahwa Kinerja dapat diasumsikan dalam kondisi baik.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang secara teknis dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) mengatur tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian/gabungan pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi/gabungan agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;

- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

LKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (*Audited*) merupakan entitas akuntansi sebagai bagian dari entitas pelaporan LKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 31 Desember 2025 (*Audited*). Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Demikian halnya dengan pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan baik transaksi maupun kejadian adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka disajikan laporan berbasis kas. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah:

1. Laporan Realisasi APBD disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau

setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

2. Penyajian pos-pos necara berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

3.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi adalah:

a) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

b) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

c) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

d) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat atau potensi jasa.
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Timbulnya kewajiban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: beban pegawai, beban barnag dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

e) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

f) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 3) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 4) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 5) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 6) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 7) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 8) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- 9) Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

c. Aset Tetap

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap terdiri dari:

- a) Tanah

- b) Peralatan dan mesin, yang diantaranya terdiri dari :
 - i. alat-alat besar
 - ii. alat-alat angkutan
 - iii. alat-alat bengkel dan alat ukur
 - iv. alat-alat pertanian/peternakan
 - v. alat-alat kantor dan rumah tangga
 - vi. alat studio dan alat komunikasi
 - vii. alat-alat kedokteran
 - viii. alat-alat laboratorium
 - ix. alat keamanan
- c) Gedung dan Bangunan
- d) Jalan, irigasi dan jaringan
 - i. jalan dan jembatan
 - ii. bangunan air/irigasi
 - iii. instalasi
 - iv. jaringan
- e) Aset tetap lainnya
 - i. buku dan perpustakaan
 - ii. barang bercorak kesenian/kebudayaan
- f) Konstruksi dalam pengerjaan
- 1) Penilaian Aset Tetap

Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Sensus Barang sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sensus Barang Daerah dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1086/2008 tentang Pelaksanaan Sensus Barang Tahun 2008. Sensus Barang Daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tertib inventarisasi dan pencatatan semua barang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi terkini mengenai barang/aset dimaksud. Selain itu,

diharapkan dapat diperoleh nilai aset tetap di setiap SKPD per 30 Juni 2007 guna penyusunan Neraca Awal SKPD.

Adapun tata cara penilaian barang hasil sensus berdasarkan Keputusan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor 4248/-077.21 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008, sehingga aset tetap yang dicatat dalam penyusunan neraca per 30 Juni 2007 setelah koreksi dicatat berdasarkan sensus barang, dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Tanah

Menggunakan metode penilaian harga sebagai berikut:

- (1) Pengadaan sebelum tahun 2007 berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB tahun 2007 atas tanah tersebut atau tanah disekitarnya.
- (2) Pengadaan tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan.

b) Bangunan/Jalan/Saluran

Menggunakan metode penilaian harga sebagai berikut:

- (1) Pengadaan sebelum tahun 2007 berdasarkan perkiraan sesuai harga bangunan aset Pemda yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau Kantor Tata Bangunan Gedung Pemerintah Daerah atau Dinas Pekerjaan Umum atau Kantor Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Pengadaan sesudah tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan.

c) Kendaraan

Menggunakan metode penilaian harga sebagai berikut:

- (1) Pengadaan sebelum tahun 2007 berdasarkan harga kendaraan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan tahun 2007 sesuai Peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2007.
- (2) Pengadaan sesudah tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan.

d) Barang Lainnya

Jenis barang lainnya yang tidak termasuk kriteria ketiga jenis barang tersebut di atas, nilai yang dicantumkan menggunakan metode penilaian harga sebagai berikut:

- (1) Pengadaan sebelum tahun 2007 berdasarkan harga barang tersebut yang tercatat pada data awal, atau jika tidak diketemukan pada data awal penilaian dilakukan berdasarkan taksiran dengan membandingkan data harga barang sejenis.
- (2) Pengadaan tahun 2007 berdasarkan bukti-bukti perolehan.

e) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan adalah apabila penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Dengan adanya sensus barang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008, berpengaruh pada nilai penyajian akun aset tetap yang bertambah besar.

Sedangkan penyusunan Neraca, penambahan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga

meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- (3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- (4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- (5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- (6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- (7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi aset tetap berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap), jika memenuhi **seluruh kriteria** sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	300.000
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

1) Penyusutan Aset

Adapun dalam penilaian aset tetap adanya penyusutan yang merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan aset tetap pertama kali dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat. Untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman. Adapun perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : $\text{Penyusutan Per Tahun} = 1 / \text{Masa Manfaat} \times \text{Nilai yang dapat disusutkan}$.

MASA MANFAAT

NO	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	TANAH	Tidak Disusutkan
2	PERALATAN DAN MESIN	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Pertenakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	ASET TETAP LAINNYA;	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak Disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan (Tanaman Hias)	Tidak Disusutkan
5.5	Aset Tetap – Renovasi	Masa kerjasama / masa umur ekonomis, yang lebih pendek
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Tidak Disusutkan

*)Berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019.

2) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai extra komtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

d. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga, yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pihak ketiga ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 3) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- 4) Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- 5) Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset

tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

- 6) Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti Aset Air Mancur & Lansekap P. Diponegoro, Patung Panglima Sudirman, Air Mancur Tugu Selamat Datang, titipan uang sewa rumah ber-SIP, titipan uang santunan pengosongan rumah (sengketa), aset tetap rusak berat.
- 7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat melakukan penyusutan atas aset tetap, karena sedang dilaksanakan proses reinventarisasi dan appraisal aset tetap serta aset tanah masih dalam proses sertifikat tanah.

g) Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- 3) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a) Kewajiban Jangka Pendek;

- (1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (2) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang baik pokok maupun bunganya, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b) Kewajiban Jangka Panjang
- (1) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (2) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.
 - (3) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga dari luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 5) Pengukuran Kewajiban
- a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - b) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - c) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

- d) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

h) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

i) Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengacu pada kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrua, dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan ada "*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*). Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 (*Audited*)
dan 2024 (*Audited*)**

(*dalam rupiah*)

Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi 31 Desember 2025 (<i>Audited</i>)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				

Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN DAERAH				
YANG SAH				
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa	434.020.906.001,00	369.440.643.783,00	85,12	377.000.582.906,00
Belanja Hibah	823.666.470.983,00	798.194.168.697,00	96,91	761.534.465.186,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.257.687.376.984,00	1.167.634.812.480,00	92,84	1.138.535.048.092,00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.800.488.875,00	26.921.721.120,00	96,84	12.871.656.458
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	586.577.426,00	517.470.900,00	88,22	27.984.767.800,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.266.658,00	11.122.200,00	98,72	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	17.896.561,00	17.454.750,00	97,53	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.416.229.520,00	27.467.768.970,00	96,66	40.856.424.258,00
BELANJA TIDAK TERDUGA				
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER				
JUMLAH BELANJA TRANSFER				
JUMLAH BELANJA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	1.286.103.606.504,00	1.195.102.581.450,00	92,92	1.179.391.472.350,00
PEMBIAYAAN DAERAH	(1.286.103.606.504,00)	(1.195.102.581.450,00)		(1.179.391.472.350,00)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah				
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00

Daerah	0,00	0,00		0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	(1.286.103.606.504,00)	(1.195.102.581.450,00)		(1.179.391.472.350,00)

4.1.1 Pendapatan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Pendapatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024 (*Audited*).

4.1.2 Belanja

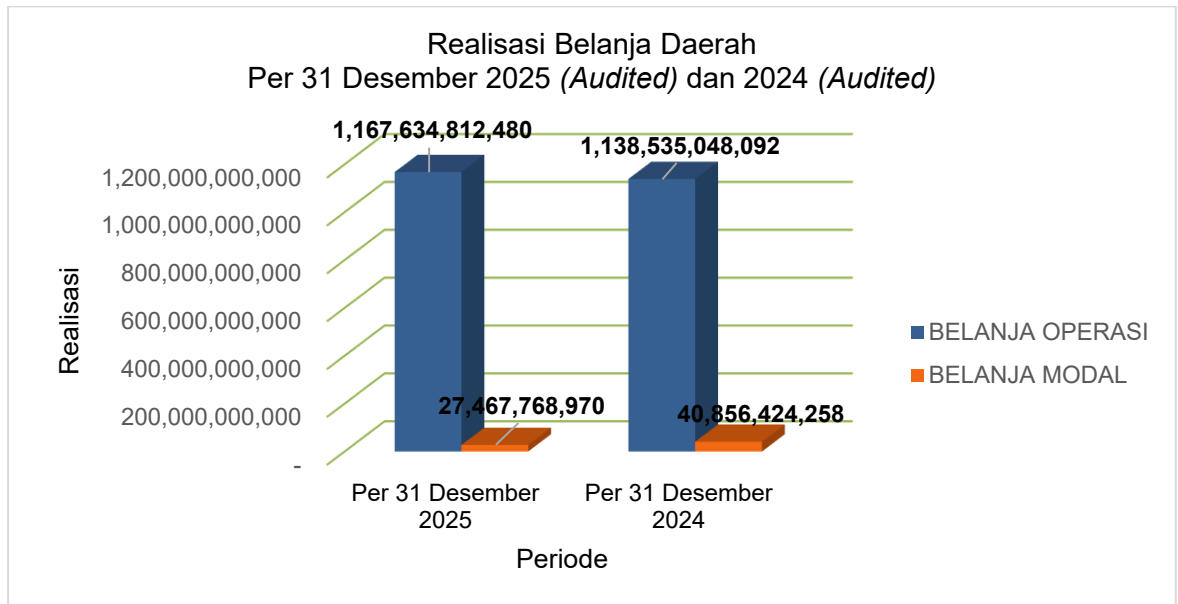
Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka untuk tahun 2025 Anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan pada unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) adalah sebesar Rp1.286.103.606.504,00 dan telah direalisasikan per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp1.195.102.581.450,00 atau 92,92%. Sedangkan realisasi 31 Desember 2024 adalah Rp1.179.391.472.350,00. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 2 Rincian Belanja Daerah
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Daerah	31 Desember 2025		%	Realisasi 31 Desember 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Belanja Operasi	1.257.687.376.984,00	1.167.634.812.480,00	92,84	1.138.535.048.092,00
2	Belanja Modal	28.416.229.520,00	27.467.768.970,00	96,66	40.856.424.258,00
	Jumlah Belanja Daerah	1.286.103.606.504,00	1.195.102.581.450,00	92,92	1.179.391.472.350,00

**Grafik 4. 1 Realisasi Belanja Daerah
Per 31 Desember 2025 (Audited) dan 2024 (Audited)**



1. Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi seluruh unit kerja per 31 Desember 2025 (Audited) adalah sebesar Rp1.257.687.376.984,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.167.634.812.480,00 atau sebesar 92,84 dari saldo anggaran. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 adalah Rp1.138.535.048.092,00. Adapun rincian belanja operasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 3 Rincian Belanja Operasi
Per 31 Desember 2025 (Audited) dan 2024 (Audited)**

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Operasi	31 Desember 2025 (Audited)		%	Realisasi 31 Desember 2024 (Audited)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Belanja Pegawai	434.020.906.001,00	369.440.643.783,00	85,12	377.000.582.906,00
2	Belanja Barang dan Jasa	823.666.470.983,00	798.194.168.697,00	96,91	761.534.465.186,00
Jumlah Belanja Operasi		1.257.687.376.984,00	1.167.634.812.480,00	92,84	1.138.535.048.092,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Belanja Operasi terdiri atas alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Adapun realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp369.440.643.783,00 atau sebesar 85,12% dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp434.020.906.001,00. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 adalah Rp377.000.582.906,00. Alokasi anggaran belanja pegawai ini dikelola oleh unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan). Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp798.194.168.697,00 atau sebesar 96,91% dari anggaran sebesar Rp823.666.470.983,00. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 adalah Rp761.534.465.186,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal unit kerja adalah sebesar Rp28.416.229.520,00 dan telah direalisasikan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp27.467.768.970,00 atau 96,66% dari anggaran. Sedangkan per 31 Desember 2024 adalah Rp40.856.424.258,00. Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 4 Rincian Belanja Modal
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Modal	31 Desember 2025 (<i>Audited</i>)		%	Realisasi Per 31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.800.488.875,00	26.921.721.120,00	96,84	12.871.656.458,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	586.577.426,00	517.470.900,00	88,22	27.984.767.800,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		28.416.229.520,00	27.467.768.970,00	96,66	40.856.424.258,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Belanja Modal terdiri atas alokasi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Adapun realisasi belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) direalisasikan melalui pembelian belanja modal peralatan dan mesin pada seluruh unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan). Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp26.921.721.120,00 atau sebesar 96,84% dari anggaran sebesar

Rp27.800.488.875,00. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 adalah Rp12.871.656.458,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) direalisasikan melalui pembelian belanja modal gedung dan bangunan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan). Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp517.470.900,00 atau sebesar 88,22% dari anggaran sebesar Rp586.577.426,00. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 adalah Rp27.984.767.800,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 (*Audited*) direalisasikan melalui pembelian belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada seluruh unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan). Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebesar Rp11.122.200,00 atau sebesar 98,72% dari anggaran sebesar Rp11.266.658,00. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 (*Audited*) direalisasikan melalui pembelian belanja modal aset tetap lainnya pada seluruh unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan). Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp17.454.750,00 atau sebesar 97,53% dari anggaran sebesar Rp17.896.561,00. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Tidak ada alokasi anggaran dan realisasi atas Belanja Modal Aset Lainnya untuk periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024.

3. Belanja Tidak Terduga

Tidak terdapat alokasi anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024.

4. Belanja Transfer

Tidak terdapat alokasi anggaran dan realisasi Belanja Transfer pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024.

4.1.3 Surplus/Defisit

Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*), Laporan Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) mengalami defisit anggaran sebesar jumlah Belanja, karena tidak adanya pencatatan terhadap Pendapatan Daerah. Defisit untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar (Rp1.195.102.581.450,00) yakni sebesar realisasi belanjanya. Sedangkan defisit untuk 31 Desember 2024 adalah (Rp1.179.391.472.350,00).

4.1.4 Pembiayaan

Tidak terdapat alokasi anggaran dan realisasi Pembiayaan, baik Penerimaan maupun Pengeluaran Pembiayaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024.

4.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan

Silpa periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar (Rp1.195.102.581.450,00) yakni sebesar realisasi

belanjanya. Sedangkan Silpa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah (Rp1.179.391.472.350,00).

4.2 Neraca

Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) terdiri atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Berikut Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan).

Tabel 4. 5 Neraca
Per 31 Desember 2025 (Audited) dan 2024 (Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Sisa UP	0,00	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00	0,00
Sisa LS	0,00	0,00	0,00
Sisa TU	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00	0,00
PPH 21 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00	0,00
PPH 22 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00	0,00
PPH 23 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00
Kas Dana BOP	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	57.013.432,00	30.457.650,00	26.555.782,00
Pembayaran Belanja	57.013.432,00	30.457.650,00	26.555.782,00
Beban Dibayar dimuka	3.560.783.208,00	2.582.667.644,00	978.115.564,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka	3.560.783.208,00	2.582.667.644,00	978.115.564,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Persediaan	8.094.871.764,00	8.639.981.105,00	(545.109.341,00)
Barang Pakai Habis	8.090.327.424,00	8.639.981.105,00	(549.653.681,00)
Barang Tak Habis Pakai	4.544.340,00	0,00	4.544.340,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	11.712.668.404,00	11.253.106.399,00	459.562.005,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG			
ASET TETAP			
Tanah	1.017.634.764.550,00	1.020.268.676.550,00	(2.633.912.000,00)
Peralatan dan Mesin	240.038.289.527,00	206.635.395.458,00	33.402.894.069,00
Gedung dan Bangunan			

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.116.433.785.984,00	1.107.699.324.915,00	8.734.461.069,00
Aset Tetap Lainnya	819.754.769,00	915.298.169,00	(95.543.400,00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.442.342.692,00	1.436.626.192,00	5.716.500,00
Akumulasi Penyusutan	76.525.200,00	76.525.200,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.088.507.137.282,00)	(1.050.879.844.621,00)	(37.627.292.661,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(199.527.503.149,00)	(185.204.298.487,00)	(14.323.204.662,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(888.451.212.648,00)	(865.090.252.139,00)	(23.360.960.509,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(503.420.285,00)	(534.090.095,00)	30.669.810,00
	(25.001.200,00)	(51.203.900,00)	26.202.700,00
JUMLAH ASET TETAP	1.287.938.325.440,00	1.286.152.001.863,00	(1.786.323.577,00)
DANA CADANGAN			
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	77.525.015.389,00	81.827.227.894,00	(4.302.212.505,00)
Aset Rusak Berat/Usang	76.030.318.384,00	77.700.539.586,00	(1.670.221.202,00)
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	1.494.697.005,00	4.126.688.308,00	(2.631.991.303,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(76.794.343.428,00)	(58.382.867.230,00)	(18.411.476.198,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(75.306.517.323,00)	(54.264.110.307,00)	(21.042.407.016,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(1.487.826.105,00)	(4.118.756.923,00)	2.630.930.818,00
JUMLAH ASET LAINNYA	730.671.961,00	23.444.360.664,00	(22.713.688.703,00)
JUMLAH ASET	1.300.381.665.805,00	1.320.849.468.926,00	(20.467.803.121,00)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
Utang Taspen	0,00	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Utang PPh Pusat	0,00	0,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai	21.656.365.406,00	21.753.961.139,00	(97.595.733,00)
Utang Belanja Barang dan Jasa	19.904.183.326,00	19.500.810.064,00	403.373.262,00
Utang Belanja Barang	1.752.182.080,00	2.253.151.075,00	(500.968.995,00)
Utang Belanja Jasa	0,00	17.795.353,00	(17.795.353,00)
Utang Belanja Pemeliharaan	1.752.182.080,00	2.235.355.722,00	(483.173.642,00)
Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
Utang Jaminan	0,00	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21.656.365.406,00	21.753.961.139,00	(97.595.733,00)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	21.656.365.406,00	21.753.961.139,00	(97.595.733,00)
EKUITAS			
Ekuitas			
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	73.699.486.061,00	102.986.663.503,00	(29.287.177.442,00)
	1.205.025.814.338,00	1.196.108.844.284,00	8.916.970.054,00
RK PPKD Kas	1.195.102.581.450,00	1.179.391.472.350,00	15.711.109.100,00
RK PPKD Non Kas	9.923.232.888,00	16.717.371.934,00	(6.794.139.046,00)
JUMLAH EKUITAS	1.278.725.300.399,00	1.299.095.507.787,00	(20.370.207.388,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.300.381.665.805,00	1.320.849.468.926,00	(20.467.803.121,00)

4.2.1 Aset

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (Audited) dan per 31 Desember 2024 (Audited). Aset tersebut terbagi dalam, aset tetap dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Rincian Aset
Per 31 Desember 2025 (Audited) dan 2024 (Audited)

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Jumlah	%
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5:4)
1	Aset Lancar	11.712.668.404,00	11.253.106.399,00	459.562.005,00	4,08
2	Aset Tetap	1.287.938.325.440,00	1.286.152.001.863,00	1.786.323.577,00	0,14
3	Aset Lainnya	730.671.961,00	23.444.360.664,00	(22.713.688.703,00)	(96,88)
Jumlah Aset		1.300.381.665.805,00	1.320.849.468.926,00	(20.467.803.121,00)	(1,55)

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa total aset seluruh unit kerja di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.300.381.665.805,00 atau (1,55%) mengalami penurunan sebesar (Rp20.467.803.121,00) jika dibandingkan total aset per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.320.849.468.926,00.

Berikut komposisi Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (*Audited*) dan per 31 Desember 2024 (*Audited*).

a) Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang terdapat pada Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (*Audited*) terdiri dari:

**Tabel 4. 7 Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024 (*Audited*)**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Lancar	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2025 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)	Jumlah	%
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5:4)
1	Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	57.013.432,00	30.457.650,00	26.555.782,00	87,19
3	Beban Dibayar Dimuka	3.560.783.208,00	2.582.667.644,00	978.115.564,00	37,87
4	Persediaan	8.094.871.764,00	8.639.981.105,00	(545.109.341,00)	(6,31)
Jumlah Aset Lancar		11.712.668.404,00	11.253.106.399,00	459.562.005,00	4,08

Berdasarkan tabel rincian Aset Lancar di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan pada posisi Aset Lancar. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp11.712.668.404,00 atau naik sebesar Rp459.562.005,00 atau 4,08% dari posisi aset lancar per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp11.253.106.399,00,-. Rincian Aset lancar ini terdiri dari :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Kas di Bank) pada Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp0,00.

2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Neraca pada Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp57.013.432,00 merupakan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tindak Lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 04/LKPD 2025/Tim-16/04/2026 tanggal 23 April 2026 yang terdiri dari :

1. Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan senilai Rp 45.951.212,41 dan sudah ditindaklanjuti dengan STS Nomor 2026.50140000.000004 Tanggal 29 April 2026.
2. Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Jagakarsa Senilai Rp 2.465.854,00 dan sudah ditindaklanjuti dengan STS Nomor 2026.50140400.000001.
3. Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Pasar Minggu Senilai Rp 3.678.485,63 dan sudah ditindaklanjuti dengan STS Nomor 2026.50140301.000001.
4. Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Pancoran Senilai Rp 4.917.878,71 dan sudah ditindaklanjuti dengan STS Nomor 4.917.879.

Saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp30.457.650,00 merupakan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja (Tindak Lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Nomor 231/LKPD 2024/Tim-06/04/2025 tanggal 15 April 2024) adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan

Tahun 2024 sebesar Rp11.644.100,00 (STS Nomor 3240297717 tanggal 21 April 2025).

2. Pengembalian kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan Gedung Kantor Kwarcab Pramuka Tahun 2024 sebesar Rp18.813.550,00 (STS Nomor 3240297725 tanggal 22 April 2025).

3. Beban Dibayar Dimuka

Terdapat Beban Dibayar Dimuka pada Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp3.560.783.208,00 berupa Beban Barang Dibayar Dimuka yang merupakan saldo akhir BBM pada 76 OPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari Sekretariat Kota, 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan. Jumlah tersebut berarti mengalami kenaikan sebesar Rp978.115.564,00 atau 37,87% jika dibandingkan total per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.582.667.644,00. Rekapitulasi Beban Bayar Dimuka dari masing-masing 76 OPD/UKPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada lampiran 1.

4. Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) dalam waktu 1 (satu) tahun.

Saldo persediaan ini merupakan hasil pengecekan fisik persediaan barang (*Stock Opname*) yang dilakukan oleh 76 OPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari Sekretariat Kota, 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan, sesuai dengan Berita Acara Stock Opname dengan saldo akhir berdasarkan perhitungan secara metode FIFO dari e-persediaan per tanggal 31 Desember 2025 (*Audited*). Adapun sampai dengan 31 Desember 2025, saldo Persediaan pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) adalah sebesar Rp8.094.871.764,00 mengalami penurunan sejumlah (Rp545.109.341,00) atau (6,31%) dari saldo persediaan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar

Rp8.639.981.105,00. Persediaan ini terdiri dari persediaan Bahan Pakai Habis dari masing-masing 76 OPD/UKPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada lampiran 2.

b) Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp1.287.938.325.440,00 merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan mengalami kenaikan sebesar Rp1.786.323.577,00 atau 0,14% dari nilai aset tetap per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.286.152.001.863,00.

Berikut ini merupakan rincian aset tetap dan rincian mutasi aset tetap Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2025 (*Audited*):

**Tabel 4. 8 Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024 (*Audited*)**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2025 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)	Jumlah	%
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (5:4)
1	Tanah	1.017.634.764.550,00	1.020.268.676.550,00	(2.633.912.000,00)	(0,26)
2	Peralatan dan mesin	240.038.289.527,00	206.635.395.458,00	33.402.894.069,00	16,17
3	Gedung dan Bangunan	1.116.433.785.984,00	1.107.699.324.915,00	8.734.461.069,00	0,79
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	819.754.769,00	915.298.169,00	(95.543.400,00)	(10,44)
5	Aset Tetap Lainnya	1.442.342.692,00	1.436.626.192,00	5.716.500,00	0,40
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.525.200,00	76.525.200,00	0,00	0,00
Total Aset tetap		2.376.445.462.722,00	2.337.031.846.484,00	39.413.616.238,00	1,69
7	Akum. Penyusutan Peralatan & Mesin	(199.527.503.149,00)	(185.204.298.487,00)	(14.323.204.662,00)	7,73
8	Akum. Penyusutan Gedung & Bangunan	(888.451.212.648,00)	(865.090.252.139,00)	(23.360.960.509,00)	2,70
9	Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	(503.420.285,00)	(534.090.095,00)	30.669.810,00	(5,74)
10	Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(25.001.200,00)	(51.203.900,00)	26.202.700,00	(51,17)
Total Akum.Peny.Aset Tetap		(1.088.507.137.282,00)	(1.050.879.844.621,00)	(37.627.292.661,00)	3,58
Jumlah Aset Tetap		1.287.938.325.440,00	1.286.152.001.863,00	1.786.323.577,00	0,14

1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp1.017.634.764.550,00 merupakan nilai tanah yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) mengalami penurunan sebesar (Rp2.633.912.000,00) dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.020.268.676.550,00.

Penurunan sebesar (Rp2.633.912.000,00) terdiri dari:

Penambahan : Rp90.025.890.050,00

- Transfer Masuk dari SKPD lain : Rp90.025.890.050,00

Pengurangan: Rp92.659.802.050,00

- Transfer Keluar ke SKPD Lain : Rp90.754.650.050,00

- Koreksi Lebih Catat Barang : Rp1.905.152.000,00

Rincian aset tetap tanah tersebut tercatat dalam KIB A (Tanah).

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp240.038.289.527,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.402.894.069,00 atau 16,17% dari Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp206.635.395.458,00.

Kenaikan sebesar Rp33.402.894.069,00 terdiri dari:

Penambahan : Rp45.191.570.534,00

- Belanja Modal TA 2025 : Rp26.921.721.120,00

- Transfer Masuk dari SKPD lain : Rp9.078.003.922,00

- Reklasifikasi Antar Aset Tetap : Rp8.296.215.271,00

- Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi Aset Tetap : Rp53.884.780,00

- Kapitalisasi dari Beban Barang : Rp467.711.963,00

- Koreksi Kurang Catat Barang : Rp9.490.500,00

Pengurangan: Rp11.788.676.465,00

- Penghapusan : Rp94.845.000,00

- Transfer Keluar ke SKPD lain : Rp5.720.156.590,00

- Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat : Rp4.903.993.000,00

- Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset : Rp21.387.250,00
Dalam Proses Penyelesaian MPSA
- Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 : Rp749.250,00
ke Beban Barang Tak Habis Pakai
- Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja : Rp7.145.375,00
Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis
Pakai

Rincian aset tetap peralatan dan mesin tersebut tercatat dalam KIB B (Peralatan dan Mesin).

Pelaksanaan Sensus KIB B Tahun 2024 sudah selesai dilaksanakan. Untuk capaian Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar 100%.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.116.433.785.984,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.734.461.069,00 atau 0,79% dari saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.107.699.324.915,00.

Kenaikan sebesar Rp8.734.461.069,00 terdiri dari:

Penambahan : Rp41.683.177.490,00

- Belanja Modal TA 2025 : Rp517.470.900,00
- Transfer Masuk dari SKPD lain : Rp40.137.740.215,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap : Rp95.543.400,00
- Reklasifikasi Aset Rusak Berat menjadi : Rp495.280.000,00
Aset Tetap
- Kapitalisasi dari Beban Barang : Rp18.611.925,00
- Koreksi Kurang Catat Barang : Rp418.531.050,00

Pengurangan : Rp32.948.716.421,00

- Transfer Keluar ke SKPD Lain : Rp24.606.186.400,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap : Rp8.284.477.021,00
- Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 : Rp58.053.000,00
Ke Beban Pemeliharaan

Rincian aset tetap gedung dan bangunan tercatat dalam KIB C (Gedung dan Bangunan).

Pelaksanaan Sensus KIB C telah selesai pada tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Sensus KIB C di Wilayah Kota Adm Jaksel.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp819.754.769,00 mengalami penurunan sebesar (Rp95.543.400,00) atau (10,44%) dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp915.298.169,00.

Penurunan sebesar (Rp95.543.400,00) terdiri dari:

Penambahan : Rp11.122.200,00

- Belanja Modal TA 2025 : Rp11.122.200,00

Pengurangan: Rp106.665.600,00

- Reklasifikasi Antar Aset Tetap : Rp95.543.400,00

- Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 : Rp11.122.200,00
menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)

Adapun rincian aset jalan, irigasi dan jaringan tercatat dalam KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan).

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp1.442.342.692,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.716.500,00 atau 0,40% dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.436.626.192,00.

Kenaikan sebesar Rp5.716.500,00 terdiri dari:

Penambahan : Rp17.454.750,00

- Belanja Modal TA 2025 : Rp17.454.750,00

Pengurangan: Rp11.738.250,00

- Reklasifikasi Antar Aset Tetap : Rp11.738.250,00

Pelaksanaan Sensus KIB E telah selesai dilaksanakan pada tahun 2025.

Rincian aset tetap lainnya tercatat dalam KIB E (Aset Tetap Lainnya).

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Terdapat saldo Rp76.525.200,00 adalah adalah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah Ciganjur pada Konstruksi Dalam Pengerjaan di Neraca per 31 Desember 2025 (*Audited*) tidak mengalami kenaikan/penurunan dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*).

Rincian kontruksi dalam pengerjaan tercatat dalam KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan).

7. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar (Rp1.088.507.137.282,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp37.627.292.661,00) dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp1.050.879.844.621,00). Saldo tersebut terdiri dari :

- Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp199.527.503.149,00)
- Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp888.451.212.648,00)
- Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar (Rp503.420.285,00)
- Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp25.001.200,00).

c) Aset Lainnya

Berikut rincian dari saldo aset lainnya Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan):

**Tabel 4. 9 Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024 (*Audited*)**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2025 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Aset Rusak Berat	76.030.318.384,00	77.700.539.586,00	(1.670.221.202,00)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(75.306.517.323,00)	(54.264.110.307,00)	(21.042.407.016,00)

3	Aset Dalam Proses Penyelesaian Mejlis Penetapan Status Aset	1.494.697.005,00	4.126.688.308,00	(2.631.991.303,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Mejlis Penetapan Status Aset	(1.487.826.105,00)	(4.118.765.923,00)	(2.630.930.818,00)
Jumlah Aset Lainnya		730.671.961,00	23.444.360.664,00	(22.713.688.703,00)

Aset Lainnya pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) Per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp730.671.961,00 mengalami penurunan sebesar (Rp22.713.688.703,00) atau (96,88%) dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp23.444.360.664,00. Aset Lainnya terdiri dari:

1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) terdiri dari Aset Rusak Berat dan Aset Dalam Proses Penyelesaian Mejlis Penetapan Status Aset. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp77.525.015.389,00 mengalami penurunan sebesar (Rp4.302.212.505,00) atau (5,26%) dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp81.827.227.894,00.

a) Aset Rusak Berat

Untuk Aset Rusak Berat pada 76 OPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sampai saat ini masih dalam proses menunggu SK Penghapusan sehingga nilainya masih tercantum dalam Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) Per 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*). Rekapitulasi Aset Rusak Berat dapat dilihat pada lampiran 3.

Aset Rusak Berat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) Per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp76.030.318.384,00 mengalami penurunan sebesar (Rp1.670.221.202,00) atau (2,15%) dari saldo per 31

Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp77.700.539.586,00. Sedangkan untuk Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) Per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar (Rp75.306.517.323,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp21.042.407.016,00) atau 38,78% dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp54.264.110.307,00).

b) Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Untuk Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2025 (*Audited*) terdapat pada 15 OPD/UKPD di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sampai saat ini progres penyelesaian menunggu SK Penghapusan.

Rekapitulasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dapat dilihat pada lampiran 4. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) Per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp1.494.697.005,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.631.991.303,00) atau (63,78%) dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp4.126.688.308,00. Sedangkan untuk Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) Per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar (Rp1.487.826.105,00) mengalami penurunan sebesar Rp2.630.930.818,00 atau (63,88%) dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp4.118.756.923,00).

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar (Rp76.794.343.428,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp18.411.476.198,00) atau 31,54% dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp58.382.867.230,00). Terdiri dari

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar (Rp75.306.517.323,00) mengalami kenaikan sebesar (Rp21.042.407.016,00) atau 38,78% dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp54.264.110.307,00) dan Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) Per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar (Rp1.487.826.105,00) mengalami penurunan sebesar Rp2.630.930.818,00 dari saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp4.118.756.923,00).

4.2.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Per 31 Desember 2025 (*Audited*) terdapat Kewajiban Jangka Pendek (utang) pada Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) sebesar Rp21.656.365.406,00 berupa Utang Belanja dimana mengalami penurunan sebesar (Rp97.595.733,00) atau (0,45%) dari saldo 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp21.753.961.139,00. Rincian utang belanja per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 10 Rincian Utang Belanja
Per 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024 (*Audited*)**

(dalam rupiah)

No	Jenis Utang Belanja	31 Desember 2025 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Utang Belanja Pegawai	19.904.183.326,00	19.500.810.064,00	403.373.262,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.752.182.080,00	2.253.151.075,00	(500.968.995,00)
	- Utang Belanja Barang	0,00	17.795.353,00	(17.795.353,00)
	- Utang Belanja Jasa	1.752.182.080,00	2.235.355.722,00	(483.173.642,00)
	Jumlah Utang Belanja	21.656.365.406,00	21.753.961.139,00	(97.595.733,00)

Daftar Rincian utang belanja diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Pegawai

Terdapat Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 (*Audited*) atau sebesar Rp19.904.183.326,00 mengalami kenaikan sebesar Rp400.373.262,00 atau 2,07% dibandingkan saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp19.500.810.064,00. Nilai saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp19.904.183.326,00 antara lain berupa:

1. Pembayaran TPP PNS/CPNS sebanyak 793 pegawai Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2025 sebesar Rp18.007.728.039,00 (Sudah dilakukan pembayaran sesuai SP2D Nomor 4000394/SP2D/I/2026 tanggal 21 Januari 2026).
2. Pembayaran TPP PPPK sebanyak 79 pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2025 sebesar Rp610.538.787,00 (Sudah dilakukan pembayaran sesuai SP2D Nomor 4000395/SP2D/I/2026 tanggal 21 Januari 2026).
3. Pembayaran TPP PLT sebanyak 8 pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2025 sebesar Rp103.860.000,00 (Sudah dilakukan pembayaran sesuai SP2D 4000481/SP2D/I/2026 tanggal 28 Januari 2026).
4. Pembayaran Rapel TPP PNS sebanyak 1 Pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan A.N. Achmad Wafa Bulan Oktober Tahun 2025 sebesar Rp9.460.800,00 (Sudah dilakukan pembayaran sesuai SP2D 4000016/SP2D/I/2026 tanggal 13 Januari 2026).
5. Pembayaran TPP Beban Kerja sebanyak 439 pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2025 sebesar Rp1.172.595.700,00 (Sudah dilakukan pembayaran sesuai SP2D Nomor 4000219/SP2D/I/2026 tanggal 15 Januari 2026).

Nilai saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp19.500.810.064,00 antara lain berupa:

1. Pembayaran TPP Beban Kerja sebanyak 403 pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2024 sebesar

- Rp1.077.380.827,00 (Sudah dilakukan pembayaran SP2D sesuai Nomor 4000017SP2D/I/2025 tanggal 17 Januari 2025).
2. Pembayaran TPP Pegawai sebanyak 787 pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2024 sebesar Rp17.790.556.437,00 (Sudah dilakukan pembayaran sesuai SP2D Nomor 4000267/SP2D/I/2025 tanggal 21 Januari 2025).
 3. Pembayaran TPP PPPK sebanyak 5 pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2024 sebesar Rp24.202.800,00 (Sudah dilakukan pembayaran sesuai SP2D Nomor 4000268/SP2D/I/2025 tanggal 21 Januari 2025).
 4. Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Bagi PLT sebanyak 44 pegawai Kota Administrasi Jakarta Selatan Bulan Desember 2024 sebesar Rp608.670.000,00 (Sudah dilakukan pembayaran sesuai SP2D Nomor 4000342/SP2D/I/2025 tanggal 23 Januari 2025).

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Terdapat Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 (*Audited*) atau sebesar Rp1.752.182.080,00 mengalami penurunan sebesar (Rp500.968.995,00) atau (22,23%) dibandingkan saldo utang barang dan jasa per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.253.151.075,00. Nilai saldo utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp1.752.182.080,00 antara lain berupa:

Utang Belanja Jasa TALI sebesar Rp1.752.182.080,00 berupa:

- Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Januari Tahun 2026 (Pemakaian Bulan Desember 2025). Sudah dilakukan pembayaran pada Bulan Januari 2026.
- Pembayaran Tagihan Telepon Bulan Januari 2026. Sudah dilakukan pembayaran pada Bulan Januari 2026.
- Pembayaran Tagihan Air inum (PAM) Bulan Januari 2026. Sudah dilakukan pembayaran pada Bulan Januari 2026.

Nilai saldo utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp2.253.151.075,00 antara lain berupa:

1. Utang Belanja Barang sebesar Rp17.795.353,00 terdiri dari:
 - Tagihan penggunaan BBM pada bulan Desember 2024 sebesar Rp7.455.173,00 pada Kelurahan Jatipadang (Sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 19 Februari 2025).
 - Tagihan penggunaan BBM pada bulan Desember 2024 sebesar Rp10.340.180 pada Kelurahan Cipete Utara (Sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 18 Februari 2025).
2. Utang Belanja Jasa sebesar Rp2.235.355.722,00 terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Jasa TALI sebesar Rp2.233.330.798,00 berupa:
 - Pembayaran Rekening Listrik Bulan Januari 2025 (Pemakaian Desember 2024). Sudah dilakukan pembayaran pada Bulan Februari 2025.
 - Pembayaran Jasa Telekomunikasi Tagihan Bulan Januari 2025. Sudah dilakukan pembayaran pada Bulan Februari 2025.
 - b. Utang Belanja Jasa Non TALI sebesar Rp2.024.924,00 berupa:
 - Tagihan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PJLP Kebersihan pada Kelurahan Petukangan Utara sebesar Rp899.966,00 (Sudah dilakukan pembayaran sesuai SP2D Nomor 4 000625/SP2D/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025).
 - Tagihan Iuran Jaminan Kematian Kerja PJLP Kebersihan pada Kelurahan Petukangan Utara sebesar Rp1.124.958,00 (Sudah dilakukan pembayaran sesuai SP2D Nomor 4 000625/SP2D/II/2025 tanggal 3 Februari 2025).

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan). Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.278.725.300.399,00 mengalami penurunan sebesar (Rp20.370.207.388,00) atau (1,57%) jika dibandingkan dengan saldo ekuitas per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar

Rp1.299.095.507.787,00. Sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.300.381.665.805,00 mengalami penurunan sebesar (Rp20.467.803.121,00) atau (1,55%) jika dibandingkan dengan saldo ekuitas per 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.320.849.468.926,00. **Rincian Ekuitas per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp1.278.725.300.399,00 sebagai berikut:**

Ekuitas	: Rp73.699.486.061,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	: Rp1.205.025.814.338,00
RK PPKD Kas	: Rp1.195.102.581.450,00
Mutasi tambah : Rp1.195.102.581.450,00	
- Realisasi Belanja per 31 Des 2025	: Rp1.195.102.581.450,00
RK PPKD Non Kas	: Rp9.923.232.888,00
Mutasi tambah : Rp150.067.230.233,00	
- Transfer Masuk dari SKPD Lain	: Rp139.260.138.687,00
- Akumulasi Penyusutan Aset yang Dihapuskan	: Rp8.776.995.270,00
- Akumulasi Penyusutan Aset yang Ditransfer Keluar ke SKPD Lain	: Rp2.030.096.276,00
Mutasi kurang : Rp140.143.997.345,00	
- Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya	: Rp8.791.777.475,00
- Transfer Keluar ke SKPD Lain	: Rp121.080.993.040,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Transfer Masuk dari SKPD Lain	: Rp10.271.226.830,00
Jumlah Ekuitas	: Rp1.278.725.300.399,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	: Rp1.300.381.665.805,00

4.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) hanya terdiri atas Beban yaitu Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan serta Beban Penyusutan dan Amortisasi. Berikut Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan):

Tabel 4. 11 Laporan Operasional
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 (Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<u>PENDAPATAN</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Perundangan-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI	1.166.275.172.426,00	1.132.634.831.325,00	33.640.341.101,00	2,97
Beban Pegawai	369.844.017.045,00	373.623.112.219,00	(3.779.095.174,00)	(1,01)
Beban Barang dan Jasa	796.431.155.381,00	759.011.719.106,00	37.419.436.275,00	4,93
Beban Barang	104.458.689.893,00	98.608.080.809,00	5.850.609.084,00	5,93
Beban Jasa	464.775.396.261,00	635.095.014.348,00	(170.319.618.087,00)	(26,82)
Beban Pemeliharaan	31.368.675.127,00	25.277.883.869,00	6.090.791.258,00	24,10
Beban Perjalanan Dinas	60.600.000,00	0,00	60.600.000,00	0,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	195.767.794.100,00	30.740.080,00	195.737.054.020,00	636.748,68
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	48.232.278.375,00	43.898.012.631,00	4.334.265.744,00)	9,87
Beban Penyusutan Peralatan dan	13.411.237.236,00	8.197.396.234,00	5.213.841.002,00	63,60

Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.185.855.627,00	34.678.452.071,00	(492.596.444,00)	(1,42)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.987.738,00	45.764.908,00	(4.777.170,00)	(10,44)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.143.300,00	0,00	1.143.300,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	593.054.474,00	976.399.418,00	(383.344.944,00)	(39,26)
Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	1.214.507.450.801,00	1.176.532.843.956,00	37.974.606.845,00	96,87
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	(1.214.507.450.801,00)	(1.176.532.843.956,00)	(37.974.606.845,00)	3,23
NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS NON OPERASIONAL- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan Pertukaran/ Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL	(0,00)	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.214.507.450.801,00)	(1.176.532.843.956,00)	(37.974.606.845,00)	3,23

Berikut penjelasan dari Uraian Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*):

a. Pendapatan-LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Tidak terdapat Pendapatan pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024 (*Audited*).

Tabel 4. 12 Rincian Pendapatan
Per 31 Desember 2025 (Audited) dan 2024 (Audited)

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00

b. Beban

Adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban-beban yang terdapat pada Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (Audited) adalah sebesar Rp1.214.507.450.801,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.974.606.845,00 atau 96,87% dari periode 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp1.176.532.843.956,00.

Adapun Rincian Beban berdasarkan Rekap Beban per 31 Desember 2025 (Audited) dan 2024 (Audited) diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Rincian Beban
Per 31 Desember 2025 (Audited) dan 2024 (Audited)

(dalam rupiah)

No	Jenis Beban	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Beban Operasi	1.166.275.172.426,00	1.132.634.831.325,00	33.640.341.101,00
	a. Beban Pegawai	369.844.017.045,00	373.623.112.219,00	(3.779.095.174,00)
	b. Beban Barang dan Jasa	796.431.155.381,00	759.011.719.106,00	37.419.436.275,00
	- Beban Barang	104.458.689.893,00	98.608.080.869,00	5.850.609.084,00
	- Beban Jasa	464.775.396.261,00	635.095.014.348,00	(170.319.618.087,00)
	- Beban Pemeliharaan	31.368.675.127,00	25.277.883.869,00	6.090.791.258,00
	- Beban Perjalanan Dinas	60.600.000,00	0,00	60.600.000,00
	- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	195.767.794.100,00	30.740.080,00	195.737.054.020,00
	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Beban	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	2	3	4	5 (3-4)
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	48.232.278.375,00	43.898.012.631,00	4.334.265.744,00
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.411.237.236,00	8.197.396.234,00	5.213.841.002,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.185.855.627,00	34.678.452.071,00	(492.596.444,00)
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.987.738,00	45.764.908,00	(4.777.170,00)
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.143.300,00	0,00	1.143.300,00
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	593.054.474,00	976.399.418,00	(383.344.944,00)
	Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
3	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00
4	Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.214.507.450.801,00	1.176.532.843.956,00	37.974.606.845,00

Rincian Beban berdasarkan Rekap Beban per 31 Desember 2025 (*Audited*) diantaranya sebagai berikut:

1. Beban Operasi pada Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.166.275.426,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.640.341.101,00 atau 2,97% dari periode 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.132.634.831.325,00.
 - a. Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp369.844.017.045,00 mengalami penurunan (Rp3.779.095.174,00) dibandingkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp373.623.112.219,00. **Berikut rincian beban pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp369.844.017.045,00, terdiri atas:**
 - Belanja Pegawai - LRA : Rp369.440.643.783,00
 - Belanja Pegawai Non BLUD - LRA : Rp369.440.643.783,00

Ditambah :

- Utang Belanja Pegawai per 31 Des 2025 : Rp19.904.183.326,00

Dikurangi :

- Utang Belanja Pegawai per 31 Des 2024 : Rp19.500.810.064,00
- b. Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp796.431.155.381,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.419.436.275,00 dibandingkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp759.011.719.106,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp796.431.155.381,00 adalah sebagai berikut:

- a) Beban Barang sebesar Rp104.458.689.893,00, terdiri atas:

- Beban Barang – LRA : Rp105.375.026.157,00
- Belanja Barang Non BLUD – LRA : Rp105.375.026.157,00
- Persediaan per 31 Des 2024 : Rp8.639.981.105,00

Ditambah :

- Belanja Barang Dibayar Dimuka : Rp2.582.667.644,00
per 31 Desember 2024
- Reklasifikasi Belanja Modal ke : Rp11.122.200,00
Barang Persediaan
- Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain : Rp5.230.625,00
ke Ekstrakomtabel

Dikurangi :

- Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset : Rp481.887.513,00
Tetap/Lain-lain
- Utang Belanja Barang per 31 Des 2024 : Rp17.795.353,00
- Belanja Barang Dibayar Dimuka : Rp3.560.783.208,00
per 31 Desember 2025 (*Audited*)
- Persediaan per 31 Desember 2025 : Rp8.094.871.764,00
- b) Beban Jasa sebesar Rp464.775.396.261,00 terdiri atas:
 - Belanja Jasa – LRA : Rp465.258.569.903,00

Ditambah :

- Utang Belanja Jasa per 31 Des 2025 : Rp1.752.182.080,00

Dikurangi :

- Utang Belanja Jasa per 31 Des 2024 : Rp2.235.355.722,00

c) Beban Pemeliharaan sebesar Rp31.368.675.127,00 terdiri atas:

Beban Pemeliharaan – LRA :

Rp31.732.178.537,00

Ditambah :

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan : Rp58.053.000,00

Dikurangi :

- Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap :
Rp364.542.978,00

- Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya : Rp57.013.432,00

d) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp60.600.000,00 terdiri atas:

Belanja Perjalanan Dinas – LRA : Rp60.600.000,00

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp60.600.000,00 merupakan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi Bulan Januari - Desember 2025.

e) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp195.767.794.100,00. Nilai ini berupa Pembayaran Operasional RT, RW dan LMK 12 bulan (bulan Januari s.d. Desember 2025) serta Operasional Posyandu Balita dan Lansia 12 bulan (bulan Januari s.d. Desember 2025) yang diberikan oleh 65 Kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah Rp48.232.278.375,00 mengalami kenaikan sebesar (Rp4.334.265.744,00) dibandingkan untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp43.898.012.631,00. **Rincian beban penyusutan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp48.232.278.375,00 terdiri atas:**

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | : Rp13.411.237.236,00 |
| b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | : Rp34.185.855.627,00 |
| c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | : Rp40.987.738,00 |
| d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | : Rp1.143.300,00 |
| e. Beban Penyusutan Aset Lainnya | : Rp593.054.474,00 |
| f. Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud | : Rp0,00 |

3. Beban Transfer

Adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) pada periode 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) tidak memiliki nilai transfer.

4. Beban Tak Terduga

Kota Administrasi Jakarta Selatan pada periode 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) tidak memiliki beban tak terduga.

5. Surplus/Defisit - LO

Pada Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah mengalami defisit operasional sebesar (Rp1.200.816.826.827,00) mengalami kenaikan sebesar Rp24.283.982.871,00 atau (97,98%) dari periode 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar (Rp1.176.532.843.956,00).

Sehingga dapat disimpulkan Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2025 (*Audited*) defisit senilai (Rp1.214.507.450.801,00) atau (96,87%) dengan selisih sebesar (Rp37.974.606.845,00) dibandingkan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) defisit senilai (Rp1.176.532.843.956,00).

4.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Kota Administrasi Jakarta Selatan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan). Adapun rinciannya dituangkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 14 Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2025 (Audited)
dan 2024 (Audited)**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas – LO</u>			
Ekuitas – LO per 31 Desember 2024 dan 2023	102.986.663.503,00	147.223.032.694,00	(44.236.369.191,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	1.196.078.386.634,00	1.132.286.918.109,00	63.791.468.525,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	0,00	0,00	0,00
Ekuitas – LO per 1 Januari 2025	1.299.065.050.137,00	1.279.509.950.803,00	19.555.099.334,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023	1.196.108.844.284,00	1.132.286.918.109,00	63.821.926.175,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	(1.196.078.386.634,00)	(1.132.286.918.109,00)	(63.791.926.175,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025	30.457.650,00	0,00	(30.457.650,00)
JUMLAH EKUITAS AWAL	1.299.095.507.787,00	1.279.509.950.803,00	19.585.556.984,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO	(1.214.507.450.801,00)	(1.176.532.843.956,00)	(Rp37.974.606.845,00)
Mutasi RK PPKD	1.204.995.356.688,00	1.196.108.844.284,00	8.866.512.404,00
Koreksi Ekuitas	(10.858.113.275,00)	9.556.656,00	(10.867.669.931,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas	(20.370.207.388,00)	19.585.556.984,00	(39.955.764.372,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO	73.699.486.061,00	102.986.663.503,00	(29.287.177.442,00)
RK PPKD	1.205.025.814.338,00	1.196.108.844.284,00	8.916.970.054,00
EKUITAS AKHIR	1.278.725.300.399,00	1.299.095.507.787,00	(20.370.207.388,00)

Dari Tabel diatas untuk Laporan Perubahan Ekuitas terlihat bahwa jumlah Ekuitas Akhir Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.278.725.300.399,00 mengalami penurunan sebesar (Rp20.370.207.388,00) dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.299.095.507.787,00. Rincian Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.278.725.300.399,00 sebagai berikut:

Jumlah Ekuitas Awal	: Rp1.299.095.507.787,00
Perubahan Ekuitas	
Surplus/Defisit LO	: (Rp1.214.507.450.801,00)
Mutasi RK PPKD	: Rp1.204.995.356.688,00
Koreksi Ekuitas	: (Rp10.858.113.275,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas	: (Rp20.370.207.388,00)
Ekuitas Akhir	
Ekuitas – LO	: Rp73.699.486.061,00
RK PPKD	: Rp1.205.025.814.338,00
Ekuitas Akhir	: Rp1.278.725.300.399,00

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Struktur Organisasi

Kota Administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. Kota Administrasi adalah wilayah kerja Walikota yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Administrasi yang dipimpin oleh camat. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

Walikota adalah kepala pemerintahan Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Walikota dibantu oleh Wakil Walikota. Walikota dan Wakil Walikota merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kota Administrasi.

Struktur Organisasi Perangkat Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Lampiran XXXVIII Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas sebagai berikut :

1. Susunan organisasi struktural Kota Administrasi terdiri dari:

- a. Walikota
- b. Wakil Walikota
- c. Sekretariat Kota

Sekretariat Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi administrasi Kota Administrasi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, Kelurahan dan UKPD di tingkat Kota Administrasi. Sekretariat Kota dipimpin oleh Sekretaris Kota yang terdiri atas:

1) Asisten Pemerintahan, terdiri atas:

- a) Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Subkelompok Bina Pemerintahan; dan
 - c. Subkelompok Tata Praja.

- b) Bagian Hukum terdiri dari:
 - a. Subkelompok Pelayanan Hukum;
 - b. Subkelompok Bantuan Hukum; dan
 - c. Subkelompok Publikasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
 - c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik terdiri dari:
 - a. Subkelompok Ketatalaksanaan;
 - b. Subkelompok Kepegawaian; dan
 - c. Subkelompok Pelayanan Publik.
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
- a) Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a. Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian
 - b. Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; dan
 - c. Subkelompok Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Subkelompok Pekerjaan Umum;
 - b. Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan; dan
 - c. Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau.
- 3) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
- a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Protokol.
 - b) Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Perbendaharaan; dan
 - c. Subkelompok Program dan Pelaporan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;

- b. Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk; dan
- c. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual.
- d. Kecamatan, terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 - 2) Seksi Pemerintahan;
 - 3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 4) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - 5) Kelurahan, terdiri atas:
 - a) Sekretariat Kelurahan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - d) Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan mencakup Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Susunan organisasi Kota Administrasi terdiri dari jabatan struktural dan di bagian Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, serta jabatan pelaksana. Bagan struktur organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan disajikan pada Gambar 5.1 sebagai berikut:

Gambar 5. 1 Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Selatan



Struktur Organisasi Perangkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas Sekretariat Kota Administrasi, 8 Bagian, beserta pejabat dengan uraian sebagai berikut:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan : M Anwar, S.S.si., M.A.P
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan : Ali Murthadho, S.Sos., M.Si.
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan : Mukhlisin, S.E., M.A.
4. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Adm Jaksel : Achmad Basyaruddin
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekko Kota Adm Jaksel : Sayid Ali Zainal A, S.H., M.Si.
6. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Adm Jaksel : Tomy Fudihartono, S. Sos., M.Si.
7. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan : Laila Saphira Murni, S.Sos.
8. Kepala Bagian Perekonomian : Siswanto Adi Nugroho, S.Sos.
9. Kepala Bagian Pemerintahan : Agni Kurnia Asdianto
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat : Hidayat
11. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Kepegawaian dan Pelayanan Publik : Azhari, S.Sos
12. Kepala Bagian Hukum : Dedi Rohedi, S.H., M.H.
13. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup : Drs. Eko Kalbarianto
14. Kepala Bagian Umum dan Protokol : Poulinawati, S.Sos., M.Si.

Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan, sebagai berikut:

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kecamatan		Kelurahan	
1	Kecamatan Tebet  Putut Puji Linangkung selaku Camat Tebet	1	Kelurahan Tebet Barat
		2	Kelurahan Tebet Timur
		3	Kelurahan Kebon Baru
		4	Kelurahan Bukit Duri
		5	Kelurahan Manggarai
		6	Kelurahan Manggarai Selatan
		7	Kelurahan Meneng Dalam
2	Kecamatan Setiabudi  Iswahyudi selaku Camat Setiabudi	1	Kelurahan Setiabudi
		2	Kelurahan Karet
		3	Kelurahan Karet Semanggi
		4	Kelurahan Karet Kuningan
		5	Kelurahan Kuningan Timur
		6	Kelurahan Meneng Atas
		7	Kelurahan Pasar Manggis
		8	Kelurahan Guntur
3	Kecamatan Mampang Prapatan  Jazuri selaku Camat Mampang Prapatan	1	Kelurahan Kuningan Barat
		2	Kelurahan Pela Mampang
		3	Kelurahan Bangka
		4	Kelurahan Tegol Parang
		5	Kelurahan Mampang Prapatan
4	Kecamatan Pasar Minggu  Guguk Trirahayu selaku Camat Pasar Minggu	1	Kelurahan Pejaten Barat
		2	Kelurahan Pejaten Timur
		3	Kelurahan Pasar Minggu
		4	Kelurahan Kebagusan
		5	Kelurahan Jati Padang
		6	Kelurahan Ragunan
		7	Kelurahan Cilandak Timur
5	Kecamatan Kebayoran Lama  Mustopa selaku Camat Kebayoran Lama	1	Kelurahan Grogol Utara
		2	Kelurahan Grogol Selatan
		3	Kelurahan Cipulir
		4	Kelurahan Kebayoran Lama Utara
		5	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan
		6	Kelurahan Pondok Pinang
6	Kecamatan Cilandak  Teguh Arifnyanto selaku Camat Cilandak	1	Kelurahan Cipele Selatan
		2	Kelurahan Gandaria Selatan
		3	Kelurahan Cilandak Barat
		4	Kelurahan Lebak Bulus
		5	Kelurahan Pondok Labu
7	Kecamatan Kebayoran Baru  Iwan Kristian Santoso selaku Camat Kebayoran Baru	1	Kelurahan Selong
		2	Kelurahan Gunung
		3	Kelurahan Kramat Pela
		4	Kelurahan Gandaria Utara
		5	Kelurahan Cipele Utara
		6	Kelurahan Pulo
		7	Kelurahan Melawai
		8	Kelurahan Petogogan
		9	Kelurahan Rawa Barat
		10	Kelurahan Senayan
8	Kecamatan Pancoran  Alamsah selaku Camat Pancoran	1	Kelurahan Kalibata
		2	Kelurahan Rawa Jati
		3	Kelurahan Duren Tiga
		4	Kelurahan Cikoko
		5	Kelurahan Pengadegan
		6	Kelurahan Pancoran
9	Kecamatan Jagakarsa  Sarta selaku Camat Jagakarsa	1	Kelurahan Tanjung Barat
		2	Kelurahan Lenteng Agung
		3	Kelurahan Jagakarsa
		4	Kelurahan Ciganjur
		5	Kelurahan Brengseng Sawah
		6	Kelurahan Cipedak
10	Kecamatan Pesanggrahan  Angga Saputra selaku Camat Pesanggrahan	1	Kelurahan Ulujami
		2	Kelurahan Petukangan Utara
		3	Kelurahan Petukangan Selatan
		4	Kelurahan Pesanggrahan
		5	Kelurahan Bintaro

5.2 Visi Dan Misi

Visi Kota Administrasi Jakarta Selatan :

“Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berbudaya, berorientasi pada pelayanan publik dan berwawasan lingkungan.”

Misi Kota Administrasi Jakarta Selatan :

- a. Menjaga karakteristik budaya Betawi dan mengembangkan pusat perkampungan Betawi.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan ketahanan budaya.
- c. Meningkatkan dan mengendalikan pelayanan publik Kota Administrasi.
- d. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan pendidikan mental spiritual.
- f. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan wilayah kerja Kota Administrasi, kompetensi aparatur dan kesadaran hukum aparatur.
- g. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, asset serta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan dan aktual.
- i. Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Selatan sebagai pusat niaga.
- j. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup.
- k. Mempertahankan wilayah Jakarta Selatan sebagai resapan air.
- l. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian sarana dan prasarana serta utilitas kota.

5.3 Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas sebagai berikut:

V.3.1 Kota Administrasi

- 1) Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.
- 2) Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
 - e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
 - j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
 - k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;

- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
 - o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
 - p. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
 - q. pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi;
 - r. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
 - s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
 - t. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
- 3) Kota Administrasi melaksanakan fungsi tambahan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
 - c. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
 - d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
 - e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

- f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
- g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
- h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

5.3.2 Kecamatan

- 1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- 2) Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
 - i. penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
 - j. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang/aset Kecamatan; dan

- k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Selain melaksanakan fungsi diatas, Kecamatan mendapatkan pelimpahan fungsi:
- a. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
 - c. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
 - d. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
 - e. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
 - g. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
 - h. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- 4) Dalam hal Kecamatan mendapatkan pelimpahan fungsi selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

5.3.3 Kelurahan

- 1) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
- 2) Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
- a) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - c) pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan;
 - d) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Kelurahan;

- e) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan;
 - f) pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
 - g) pembinaan dan koordinasi rukun warga dan rukun tetangga;
 - h) penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - i) pengelolaan kesekretariatan Kelurahan; dan
 - j) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Selain melaksanakan fungsi pada angka 2), Kelurahan melaksanakan fungsi:
- a) pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
 - b) fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
 - c) fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
 - d) fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
 - e) fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - f) fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
 - g) fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
 - h) fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- 4) Dalam hal Kelurahan mendapatkan penambahan fungsi selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

5.4 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran merupakan formulasi kebijakan strategis yang menjadi tolok ukur pencapaian pembangunan ke depan yang dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis yang holistik. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan menjawab isu strategis aktual. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari hasil (outcome) program perangkat daerah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional.

Tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2023 s/d 2026 dijabarkan dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran ini dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 serta tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dan sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023-2026. Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Semester II Tahun 2025 secara keseluruhan sangat memuaskan. Hal tersebut dapat terlihat dari 3 (tiga) capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berhasil mencapai nilai diatas target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan target sebesar 95,61, realisasi sebesar 96,15, capaian yaitu 100,56%.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan target sebesar realisasi 96,8, realisasi sebesar 97,45 capaian yaitu 100,68%.
3. Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi dengan target sebesar 94,415 realisasi sebesar 94,85, capaian yaitu 100,46%.

5.4.1 Tujuan Strategis

Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal.

5.4.2 Sasaran Strategis

Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal.

5.5 Target Kinerja Strategis

Target Kinerja Strategis pada Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Target Kinerja Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan %
1	2	3	4	5	6=(4/5)*100
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Selatan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	96,15	89,5	107,43
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	97,46	88,8	109,75
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	94,85	88,5	107,18

Sumber: Renstra 2023-2026 dan e-Monev

Target sasaran strategis Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Tahun 2025 sebagian besar dapat terlaksana sesuai dengan target, salah satunya dengan mendorong pelaksanaan program, kegiatan sampai dengan subkegiatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi lebih optimal dengan menghasilkan *output* kinerja sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

5.6 Penghargaan yang Diterima

Penghargaan atau prestasi yang telah diterima Kota Administrasi Jakarta Selatan selama Tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

No	SKPD/UKPD	Nama Penghargaan	Intansi/Lembaga Pemberi Penghargaan	Peringkat/Juara/Prestasi
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Penghargaan Capaian Kinerja Tertinggi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Kota Tingkat Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah Republik Indonesia	Capaian Kinerja Tertinggi Kategori Kota Tingkat Nasional
2	Sudin PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan	Penghargaan Kota Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Peringkat Utama
3	Sudin Sosial Kota Adm. Jakarta Selatan	Penghargaan penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia	Ombudsman Republik Indonesia	Kualitas Tertinggi Zona Hijau
4	Sudin Sosial Kota Adm. Jakarta Selatan	Penghargaan organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan predikat 'pelayanan prima' pada PEKPPP tahun 2024 dari MenPANRB	MenPAN RB	Predikat Pelayanan Prima

No	SKPD/UKPD	Nama Penghargaan	Intansi/Lembaga Pemberi Penghargaan	Peringkat/Juara/Prestasi
5	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Juara 1 Pemenang Paritrana Awards Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 - Kategori Pemerintah Kota/Kabupaten	BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta	Juara 1
6	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Selatan	Peringkat Kedua Perolehan Hasil Bulan Dana PMI	PMI Kota Jakarta Selatan	Peringkat kedua
7	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Selatan	Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Ombudsman Republik Indonesia	Kualitas tertinggi
8	Unit Pengelola Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Adm. Jakarta Selatan	SERTIDFIKAT SNI ISO 9001:2015	SUCOFINDO INTERNATIONAL	
9	Unit Pengelola Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Adm. Jakarta Selatan	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024	OMBUDSMAN RI	Kualitas tertinggi dengan memperoleh nilai 97,04

No	SKPD/UKPD	Nama Penghargaan	Intansi/Lembaga Pemberi Penghargaan	Peringkat/Juara/Prestasi
10	Unit Pengelola Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Adm. Jakarta Selatan	Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kota Adm. Jakarta Selatan (Telah Memberikan Dukungan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Masyarakatan Daerah Khusus Jakarta)	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DAERAH KHUSUS JAKARTA	
11	Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan 2025	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta	Proklam, Adiwiyata, BPS RW, Bank Sampah dan Penggiat Maggot
12	Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	Penghargaan Adiwiyata Nasional & Adiwiyata Mandiri Tahun 2025	Kementrian Lingkungan Hidup	Adiwiyata Nasional : SMKN 15 Jakarta Adiwiyata Mandiri : SDN Lebak Bulus 02, SMPN 48 Jakarta, SMAN 28 Jakarta
13	Lurah Kelurahan Cikoko	Peacemaker Justice Award 2025	Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia	10 Besar Peacemaker Justice Award
14	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024	Ombudsman RI	Kualitas Tertinggi (Zona Hijau) dengan Nilai 94,57

No	SKPD/UKPD	Nama Penghargaan	Intansi/Lembaga Pemberi Penghargaan	Peringkat/Juara/Prestasi
15	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Predikat "Pelayanan Prima" pada PEKPPP Tahun 2024	Kemenpan RB	Pelayanan Prima
16	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Knowledge Management Award Tahun 2025	BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Aset Pengetahuan Komprehensif
17	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Penghargaan Pengelolaan Kearsipan Dinamis Tahun 2025	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Peringkat III Kategori AA "Sangat Memuaskan" dengan nilai 94,44
18	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jakarta Innovation Days 2025 Kategori Masyarakat	Bappeda DKI Jakarta	Juara 2 Kategori Masyarakat
19	Kelurahan Cikoko	Jakarta Innovation Days 2025 Kategori Kelurahan	Bappeda DKI Jakarta	Juara 2 Kategori Kelurahan
20	Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan	Apresiasi Tim Pendamping Keluarga Terbaik I	Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	Terbaik I : Tim Pendamping Keluarga Kelurahan Pasar Minggu
21	Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan	Apresiasi Kader IMP/ PPKBD atau Sub PPKBD Terbaik II	Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	Terbaik II: Kader Sub PPKBD Kelurahan Srengseng Sawah a/n
22	Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan	Apresiasi KB Lestari 20 Tahun Terbaik III	Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	Terbaik III
23	Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan	Apresiasi Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik III	Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	Terbaik III

No	SKPD/UKPD	Nama Penghargaan	Intansi/Lembaga Pemberi Penghargaan	Peringkat/Juara/Prestasi
24	Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan	Apresiasi Rumah Data Kependudukan Harapan III	Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	Harapan III
25	Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan	Peserta Terbaik III "Ajang Kespro Untuk Kawula Muda" (AKUKAMU) 2025	Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	Terbaik III
26	Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan	Apresiasi Peran Klinik Swasta	Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	Juara II
27	Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Selatan	Apresiasi Role Model TPMB	Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta	Terbaik I
28	Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Penghargaan Adinkes AIDS, TBC dan Malaria (ATM) AWARDS kepada Kota Administrasi Jakarta Selatan	ADINKES	
29	Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta Selatan	Capaian Indikator 95 Kedua Terbaik Periode April-Juni 2025	EPIC	Juara II
30	SDN CIPETE SELATAN 05 PAGI	Kejuaraan Pencak Silat Piala Menpora ke-4 Tingkat Nasional Tahun 2025	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	Juara 1 Tanding Usia Dini 1 Putri Kelas Pemasalan
31	SMP NEGERI 267 JAKARTA	Kejuaraan Pekan Olahraga TK. Provinsi DKI Jakarta	Dinas Dispora	Juara 3 Putra
32	SDN TANJUNG BARAT 03 PAGI	KEJUARAAN KARATE BHARADUTA CHAMPIONSHIP	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	JUARA 2
33	SDN TANJUNG BARAT 03 PAGI	BHARADUTA CHAMPIONSHIP SERIES V	KEMENPORA RI	JUARA 1

No	SKPD/UKPD	Nama Penghargaan	Intansi/Lembaga Pemberi Penghargaan	Peringkat/Juara/Prestasi
34	SDN SRENGSENG SAWAH 01	Kejuaraan Pencak Silat Antar Pelajar Tingkat Nasional BNN Cup 6	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	Juara 1 Usia Dini 1 Utri Kelas Under (0 - 26 Kg) Pool 9
35	SDN SRENGSENG SAWAH 04	Kejuaraan PEncak Silat Piala Menpora RI ke-4 Tingkat Nasional Tahun 2025	KEMENPORA RI	Juara 1 Usia Dini 2 Prestasi Putra Seni Tunggal IPSI
36	SMA Negeri 38 Jakarta	Sekolah Adiwiyata Nasional 2024	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Sekolah Adiwiyata Nasional 2024
37	SD Negeri Lebak Bulus 02	Sekolah Adiwiyata Mandiri 2025	Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Lingkungan Hidup/Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	Sekolah Adiwiyata Mandiri
38	SLB NEGERI 12 JAKARTA	Apresiasi GTK Provinsi DKI Jakarta 2025	BGTK Provinsi DKI Jakarta	3 katagori guru SLB Dedikatif
39	SMAN 87 JAKARTA	OLIMPIADE TAEKWONDO	KEMENPORA	Juara 3
40	SD NEGERI CIPETE SELATAN 05 PAGI	KEJUARAAN PENCAK SILAT PIALA MENPORA RI KE 4 TINGKAT NASIONAL TAHUN 2025	KEMENPORA	JUARA 1
41	SD NEGERI CIPETE SELATAN 05 PAGI	KEJUARAAN PENCAK SILAT PIALA MENPORA RI KE 4 TINGKAT NASIONAL TAHUN 2025	KEMENPORA	JUARA 1
42	SMA Negeri 38 Jakarta	Environmental Science Category	GYIIF (Global Youth Invention and Innovation Fair)	Silver Medal

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per per 31 Desember 2025 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi. Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan entitas akuntansi sebagai bagian dari entitas Laporan LKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mana wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas laporan. Pada Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 (*Audited*) ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024 (*Audited*) menyajikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.195.102.581.450,00 atau 92,92% dari total Anggaran Belanja sebesar Rp1.286.103.606.504,00 dan mengalami kenaikan dari realisasi belanja 31 Desember 2024 sebesar Rp1.179.391.472.350,00.

2. Neraca

Neraca Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) pada periode 31 Desember 2025 (*Audited*) menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana. Pada periode 31 Desember 2025 (*Audited*) jumlah aset sebesar Rp1.300.381.665.805,00 atau turun sebesar (1,55%) dari periode sampai dengan 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.320.849.468.926,00, kewajiban mengalami penurunan sebesar (Rp97.595.733,00) dari periode 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp21.753.961.139,00 menjadi Rp21.656.365.406,00, jumlah ekuitas sebesar Rp1.278.725.300.399,00 atau turun sebesar (1,57%) dari periode sampai dengan

31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.320.849.468.926,00 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas menjadi Rp1.300.381.665.805,00 turun sebesar (1,55%) dibandingkan periode 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.320.849.468.926,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sehingga dapat disimpulkan Laporan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) defisit senilai (Rp1.214.507.450.801,00) dikarenakan tidak ada pendapatan dibandingkan periode 31 Desember 2024 (*Audited*) defisit senilai (Rp1.176.532.843.956,00).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan). Dari Laporan Perubahan Ekuitas diatas terlihat bahwa jumlah Ekuitas Akhir Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.278.725.300.399,00 mengalami penurunan sebesar (Rp20.370.207.388,00) dari 31 Desember 2024 (*Audited*) sebesar Rp1.299.095.507.787,00.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban,

Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Demikian Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Gabungan) per 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada pada Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mana telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 21 Mei 2026
Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



M. Anwar
NIP. 196605281998031003



LAMPIRAN

**Lampiran 1 Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2025 (Audited) dan 2024 (Audited)**

(dalam rupiah)

No.	Nama PD/UKPD	Beban Dibayar Dimuka		Kenaikan/Penurunan
		31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	
1	2	3	4	5
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan	70.245.398,00	62.293.749,00	7.951.649,00
2	Kecamatan Kebayoran Lama	19.937.270,00	3.200.000,00	16.737.270,00
3	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	57.231.232,00	82.918.822,00	(25.687.590,00)
4	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	64.325.066,00	83.423.454,00	(19.098.388,00)
5	Kelurahan Pondok Pinang	50.856.910,00	42.409.580,00	8.447.330,00
6	Kelurahan Cipulir	66.557.210,00	81.654.120,00	(15.096.910,00)
7	Kelurahan Grogol Selatan	61.908.462,00	46.685.991,00	15.222.471,00
8	Kelurahan Grogol Utara	119.962.670,00	102.494.940,00	17.467.730,00
9	Kecamatan Pesanggrahan	41.650.228,00	16.714.009,00	24.936.219,00
10	Kelurahan Pesanggrahan	328.978.148,00	311.187.699,00	17.790.449,00
11	Kelurahan Petukangan Selatan	28.846.498,00	71.538.483,00	(42.691.985,00)
12	Kelurahan Petukangan Utara	26.668.803,00	26.043.266,00	625.537,00
13	Kelurahan Ulujami	89.325.068,00	71.000.493,00	18.324.575,00
14	Kelurahan Bintaro	89.237.201,00	91.485.812,00	(2.248.611,00)
15	Kecamatan Pasar Minggu	7.777.158,00	17.961.389,00	(10.184.231,00)
16	Kelurahan Pasar Minggu	13.803.295,00	53.959.506,00	(40.156.211,00)
17	Kelurahan Jatipadang	27.745.391,00	-	27.745.391,00
18	Kelurahan Ragunan	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)
19	Kelurahan Cilandak Timur	39.094.481,00	39.753.011,00	(658.530,00)
20	Kelurahan Kebagusan	7.051.417,00	8.805.263,00	(1.753.846,00)
21	Kelurahan Pejaten Barat	29.599.082,00	39.470.635,00	(9.871.553,00)
22	Kelurahan Pejaten Timur	17.042.470,00	4.000.000,00	13.042.470,00
23	Kecamatan Jagakarsa	3.005.888,00	843.363,00	2.162.525,00
24	Kelurahan Jagakarsa	54.378.573,00	36.180.826,00	18.197.747,00
25	Kelurahan Ciganjur	82.125.604,00	40.864.364,00	41.261.240,00
26	Kelurahan Srengseng Sawah	137.887.668,00	26.732.171,00	111.155.497,00
27	Kelurahan Lenteng Agung	41.652.009,00	59.380.359,00	(17.728.350,00)
28	Kelurahan Tanjung Barat	47.309.773,00	19.983.020,00	27.326.753,00
29	Kelurahan Cipadak	34.824.499,00	7.908.798,00	26.915.701,00
30	Kecamatan Mampang Prapatan	-	-	0,00
31	Kelurahan Tegal Parang	8.997.696,00	19.173,00	8.978.523,00
32	Kelurahan Mampang Prapatan	-	-	-
33	Kelurahan Pela Mampang	9.400.000,00	-	9.400.000,00
34	Kelurahan Kuningan Barat	39.746.420,00	-	39.746.420,00
35	Kelurahan Bangka	12.524.535,00	-	12.524.535,00
36	Kecamatan Pancoran	8.522.047,00	4.528.191,00	3.993.856

37	Kelurahan Pancoran	34.373.943,00	19.727.245,00	14.646.698,00
38	Kelurahan Duren Tiga	29.476.745,00	13.827.715,00	15.649.030,00
39	Kelurahan Kalibata	22.321.387,00	22.087.508,00	233.879,00
40	Kelurahan Rawajati	21.200.445,00	-	0,00
41	Kelurahan Pangadegan	29.684.703,00	19.478.836,00	10.205.867,00
42	Kelurahan Cikoko	35.740.478,00	27.395.779,00	8.344.699,00
43	Kecamatan Kebayoran Baru	16.907.499,00	7.201.757,00	9.705.742,00
44	Kelurahan Gandaria Utara	49.839.915,00	39.556.790,00	10.283.125,00
45	Kelurahan Cipete Utara	5.396.030,00	-	5.396.030,00
46	Kelurahan Pulo	37.994.509,00	15.913.008,00	22.081.501,00
47	Kelurahan Petogogan	76.755.991,00	52.057.235,00	24.698.756,00
48	Kelurahan Melawai	10.058.805,00	-	0,00
49	Kelurahan Kramat Pela	19.034.970,00	20.000.000,00	(965.030,00)
50	Kelurahan Gunung	424.518.573,00	264.393.792,00	160.124.781,00
51	Kelurahan Selong	45.269.632,00	-	45.269.632,00
52	Kelurahan Rawa Barat	51.062.220,00	-	51.062.220,00
53	Kelurahan Senayan	-	-	0,00
54	Kecamatan Setiabudi	46.414.517,00	21.272.669,00	25.141.848,00
55	Kelurahan Karet Semanggi	17.302.495,00	21.402.425,00	(4.099.930,00)
56	Kelurahan Kuningan Timur	35.717.898,00	9.562.958,00	26.154.940,00
57	Kelurahan Karet Kuningan	76.911.580,00	56.842.630,00	20.068.950,00
58	Kelurahan Karet	17.855.689,00	63.065.763,00	(45.210.074,00)
59	Kelurahan Menteng Atas	33.487.613,00	13.550.837,00	19.936.776,00
60	Kelurahan Pasar Manggis	36.797.870,00	-	36.797.870,00
61	Kelurahan Guntur	35.270.204,00	41.640.371,00	(6.370.167,00)
62	Kelurahan Setia Budi	59.894.778,00	8.897.440,00	50.997.338,00
63	Kecamatan Tebet	3.145.046,00	11.349.771,00	(8.204.725,00)
64	Kelurahan Menteng Dalam	6.989.026,00	6.315.323,00	673.703,00
65	Kelurahan Tebet Barat	86.957.091,00	49.703.959,00	37.253.132,00
66	Kelurahan Tebet Timur	39.411.647,00	28.656.166,00	10.755.481,00
67	Kelurahan Kebon Baru	48.920.599,00	98.411.868,00	(49.491.269,00)
68	Kelurahan Bukit Duri	66.891.348,00	4.324.299,00	62.567.049,00
69	Kelurahan Manggarai Selatan	42.189.405,00	54.396.243,00	(12.206.838,00)
70	Kelurahan Manggarai	33.068.439,00	14.607.015,00	18.461.424,00
71	Kecamatan Cilandak	38.472.336,00	31.641.096,00	6.831.240,00
72	Kelurahan Lebak Bulus	31.943.864,00	15.548.696,00	16.395.168,00
73	Kelurahan Pondok Labu	33.370.995,00	23.304.679,00	10.066.316,00
74	Kelurahan Cilandak Barat	48.378.140,00	2.548.178,00	45.829.962,00
75	Kelurahan Gandaria Selatan	46.803.233,00	27.558.972,00	19.244.261,00
76	Kelurahan Cipete Selatan	26.735.380,00	12.986.134,00	13.749.246,00
Jumlah		3.560.783.208,00	2.582.667.644,00	978.115.564,00

**Lampiran 2 Rekapitulasi Persediaan
Per 31 Desember 2025 (Audited) dan 2024 (Audited)**

(dalam rupiah)

No.	Nama PD/UKPD	Persediaan		Kenaikan/Penurunan
		31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	
1	2	3	4	5
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan	749,602,296.00	753,907,921.00	(4,305,625.00)
2	Kecamatan Kebayoran Lama	28,486,170.00	22,942,854.00	5,543,316.00
3	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	65,666,379.00	57,937,516.00	7,728,863.00
4	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	337,755,581.00	802,905,675.00	(465,150,094.00)
5	Kelurahan Pondok Pinang	200,290,788.00	131,498,731.00	68,792,057.00
6	Kelurahan Cipulir	27,711,700.00	13,074,900.00	14,636,800.00
7	Kelurahan Grogol Selatan	99,138,452.00	73,518,753.00	25,619,699.00
8	Kelurahan Grogol Utara	58,295,187.00	179,178,632.00	(120,883,445.00)
9	Kecamatan Pesanggrahan	136,881,914.00	127,008,601.00	9,873,313.00
10	Kelurahan Pesanggrahan	30,417,736.00	42,154,367.00	(11,736,631.00)
11	Kelurahan Petukangan Selatan	44,562,187.00	11,188,900.00	33,373,287.00
12	Kelurahan Petukangan Utara	30,470,605.00	22,151,698.00	8,318,907.00
13	Kelurahan Ulujam	27,813,767.00	42,012,988.00	(14,199,221.00)
14	Kelurahan Bintaro	21,207,745.00	14,673,936.00	6,533,809.00
15	Kecamatan Pasar Minggu	40,913,435.00	61,633,766.00	(20,720,331.00)
16	Kelurahan Pasar Minggu	33,728,771.00	44,610,895.00	(10,882,124.00)
17	Kelurahan Jatipadang	78,455,969.00	64,257,613.00	14,198,356.00
18	Kelurahan Ragunan	331,089,883.00	344,589,026.00	(13,499,143.00)
19	Kelurahan Cilendak Timur	91,288,206.00	124,054,245.00	(32,766,039.00)
20	Kelurahan Kebagusan	43,664,254.00	26,168,656.00	17,495,598.00
21	Kelurahan Pejaten Barat	76,459,002.00	68,805,323.00	7,653,679.00
22	Kelurahan Pejaten Timur	120,775,021.00	58,503,720.00	62,271,301.00
23	Kecamatan Jagakarsa	92,697,312.00	79,715,011.00	12,982,301.00
24	Kelurahan Jagakarsa	33,061,910.00	81,528,301.00	(48,466,391.00)
25	Kelurahan Ciganjur	197,771,671.00	190,641,990.00	7,129,681.00
26	Kelurahan Srengseng Sawah	68,925,804.00	142,378,529.00	(73,452,725.00)
27	Kelurahan Lenteng Agung	153,229,367.00	31,330,408.00	121,898,959.00
28	Kelurahan Tanjung Barat	161,654,335.00	122,215,842.00	39,438,493.00
29	Kelurahan Cipendak	43,396,299.00	21,814,150.00	21,582,149.00
30	Kecamatan Mampang Prapatan	48,659,092.00	14,059,458.00	34,599,634.00
31	Kelurahan Tegal Parang	15,766,551.00	16,136,656.00	(370,105.00)
32	Kelurahan Mampang Prapatan	8,162,972.00	6,526,800.00	1,636,172.00
33	Kelurahan Pela Mampang	16,981,926.00	13,345,835.00	3,636,091.00
34	Kelurahan Kuningan Barat	21,532,235.00	36,781,930.00	(15,249,695.00)
35	Kelurahan Bangka	53,008,248.00	13,671,719.00	39,336,529.00
36	Kecamatan Pancoran	57,450,936.00	120,685,219.00	(63,234,283.00)

37	Kelurahan Pancoran	17,750,349.00	16,170,600.00	1,579,749.00
38	Kelurahan Duren Tiga	118,694,174.00	90,662,052.00	28,032,122.00
39	Kelurahan Kalibata	26,821,393.00	11,032,109.00	15,789,284.00
40	Kelurahan Rawajati	104,803,763.00	70,512,822.00	34,290,941.00
41	Kelurahan Pangadegan	45,780,779.00	34,723,590.00	11,057,189.00
42	Kelurahan Cikoko	158,350,065.00	97,507,392.00	60,842,673.00
43	Kecamatan Kebayoran Baru	128,858,591.00	83,573,460.00	45,285,131.00
44	Kelurahan Gandaria Utara	151,682,486.00	114,290,956.00	37,391,530.00
45	Kelurahan Cipete Utara	116,504,594.00	206,067,901.00	(89,563,307.00)
46	Kelurahan Pulo	75,139,054.00	22,567,900.00	52,571,154.00
47	Kelurahan Petogogan	70,098,980.00	56,711,010.00	13,387,970.00
48	Kelurahan Melawai	115,804,003.00	345,726,278.00	(229,922,275.00)
49	Kelurahan Kramat Pela	291,076,914.00	212,916,115.00	78,160,799.00
50	Kelurahan Gunung	272,344,117.00	56,581,389.00	215,762,728.00
51	Kelurahan Selong	421,472,695.00	440,309,999.00	(18,837,304.00)
52	Kelurahan Rawa Barat	684,651,432.00	761,854,349.00	(77,202,917.00)
53	Kelurahan Senayan	20,137,054.00	8,707,829.00	11,429,225.00
54	Kecamatan Setiabudi	31,614,403.00	11,599,945.00	20,014,458.00
55	Kelurahan Karet Semanggi	2,162,480.00	8,322,500.00	(6,160,020.00)
56	Kelurahan Kuningan Timur	611,921.00	80,543,675.00	(79,931,754.00)
57	Kelurahan Karet Kuningan	224,148,582.00	287,705,178.00	(63,556,596.00)
58	Kelurahan Karet	16,570,596.00	18,471,002.00	(1,900,406.00)
59	Kelurahan Menteng Atas	189,505,144.00	204,472,501.00	(14,967,357.00)
60	Kelurahan Pasar Manggis	37,420,043.00	34,452,250.00	2,967,793.00
61	Kelurahan Guntur	98,527,073.00	128,432,737.00	(29,905,664.00)
62	Kelurahan Setia Budi	20,625,909.00	18,365,603.00	2,260,306.00
63	Kecamatan Tebet	11,377,223.00	37,098,630.00	(25,721,407.00)
64	Kelurahan Menteng Dalam	101,336,038.00	96,825,409.00	4,510,629.00
65	Kelurahan Tebet Barat	52,966,110.00	62,861,500.00	(9,895,390.00)
66	Kelurahan Tebet Timur	83,346,771.00	35,327,302.00	48,019,469.00
67	Kelurahan Kebon Baru	65,159,310.00	71,409,467.00	(6,250,157.00)
68	Kelurahan Bukit Duri	49,500,882.00	16,015,371.00	33,485,511.00
69	Kelurahan Manggarai Selatan	94,258,019.00	56,612,789.00	37,645,230.00
70	Kelurahan Manggarai	17,974,085.00	18,908,341.00	(934,256.00)
71	Kecamatan Cilandak	105,179,297.00	98,762,556.00	6,416,741.00
72	Kelurahan Lebak Bulus	86,270,346.00	311,250,687.00	(224,980,341.00)
73	Kelurahan Pondok Labu	60,488,460.00	55,842,940.00	4,645,520.00
74	Kelurahan Cilandak Barat	21,404,295.00	35,047,956.00	(13,643,661.00)
75	Kelurahan Gandaria Selatan	201,170,672.00	272,585,088.00	(71,414,416.00)
76	Kelurahan Cipete Selatan	56,309,956.00	71,541,363.00	(15,231,407.00)
Jumlah		8,094,871,764.00	8,639,981,105.00	(545,109,341.00)

**Lampiran 3 Rekapitulasi Aset Rusak Berat
Per 31 Desember 2025 (Audited) dan 2024 (Audited)**

(dalam rupiah)

No.	Nama PD/UKPD	Aset Rusak Berat		Kenaikan/Penurunan
		31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	
1	2	3	4	5
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan	6,856,341,755.00	4,343,241,704.00	2,513,100,051.00
2	Kecamatan Kebayoran Lama	535,842,042.00	800,366,816.00	(264,524,774.00)
3	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	734,143,055.00	761,125,780.00	(26,982,725.00)
4	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	836,104,031.00	831,794,298.00	4,309,733.00
5	Kelurahan Pondok Pinang	610,722,357.00	706,342,565.00	(95,620,208.00)
6	Kelurahan Cipulir	253,815,486.00	576,683,071.00	(322,867,585.00)
7	Kelurahan Grogol Selatan	411,674,522.00	423,884,966.00	(12,210,444.00)
8	Kelurahan Grogol Utara	909,833,323.00	1,178,341,123.00	(268,507,800.00)
9	Kecamatan Pesanggrahan	625,864,703.00	625,864,703.00	-
10	Kelurahan Pesanggrahan	448,375,585.00	482,105,425.00	(33,729,840.00)
11	Kelurahan Petukangan Selatan	707,377,615.00	707,377,615.00	-
12	Kelurahan Petukangan Utara	1,107,540,431.00	1,107,540,431.00	-
13	Kelurahan Ulujami	228,174,700.00	228,174,700.00	-
14	Kelurahan Bintaro	2,539,912,894.00	2,382,219,600.00	157,693,294.00
15	Kecamatan Pasar Minggu	729,161,351.00	768,233,348.00	(39,071,997.00)
16	Kelurahan Pasar Minggu	607,032,194.00	607,032,194.00	-
17	Kelurahan Jatipadang	1,022,127,965.00	1,022,127,965.00	-
18	Kelurahan Ragunan	563,941,705.00	563,941,705.00	-
19	Kelurahan Cilandak Timur	781,092,100.00	736,889,100.00	44,203,000.00
20	Kelurahan Kebagusan	902,646,127.00	902,646,127.00	-
21	Kelurahan Pejaten Barat	1,097,131,400.00	1,097,131,400.00	-
22	Kelurahan Pejaten Timur	1,155,237,321.00	1,220,920,821.00	(65,683,500.00)
23	Kecamatan Jagakarsa	2,406,348,209.00	2,402,992,659.00	3,355,550.00
24	Kelurahan Jagakarsa	1,384,211,300.00	1,392,516,300.00	(8,305,000.00)
25	Kelurahan Ciganjur	676,190,458.00	610,167,458.00	66,023,000.00
26	Kelurahan Srengseng Sawah	732,693,630.00	625,777,430.00	106,916,200.00
27	Kelurahan Lenteng Agung	810,559,868.00	810,559,868.00	-
28	Kelurahan Tanjung Barat	1,064,623,853.00	1,064,623,853.00	-
29	Kelurahan Cipedak	1,565,211,733.00	1,578,611,233.00	(13,399,500.00)
30	Kecamatan Mampang Prapatan	1,054,868,267.00	1,173,241,787.00	(118,373,520.00)
31	Kelurahan Tegal Parang	1,183,167,530.00	1,132,064,530.00	51,103,000.00
32	Kelurahan Mampang Prapatan	1,595,842,246.00	1,595,842,246.00	-
33	Kelurahan Pela Mampang	3,402,969,005.00	3,302,383,005.00	100,586,000.00
34	Kelurahan Kuningan Barat	481,000,139.00	434,039,639.00	46,960,500.00
35	Kelurahan Bangka	3,880,114,959.00	3,880,114,959.00	-

36	Kecamatan Pancoran	457,561,997.00	1,124,135,537.00	(666,573,540.00)
37	Kelurahan Pancoran	1,276,821,573.00	1,352,925,573.00	(76,104,000.00)
38	Kelurahan Duren Tiga	147,258,100.00	243,487,100.00	(96,229,000.00)
39	Kelurahan Kalibata	570,169,381.00	730,835,767.00	(160,666,386.00)
40	Kelurahan Rawajati	491,392,970.00	597,921,321.00	(106,528,351.00)
41	Kelurahan Pangadegan	188,608,500.00	469,509,868.00	(280,901,368.00)
42	Kelurahan Cikoko	651,475,682.00	725,888,153.00	(74,412,471.00)
43	Kecamatan Kebayoran Baru	2,230,489,807.00	2,337,979,399.00	(107,489,592.00)
44	Kelurahan Gandaria Utara	1,197,013,470.00	1,150,266,970.00	46,746,500.00
45	Kelurahan Cipete Utara	1,034,922,270.00	1,128,427,903.00	(93,505,633.00)
46	Kelurahan Pulo	874,231,052.00	874,231,052.00	-
47	Kelurahan Petogogan	495,549,075.00	495,549,075.00	-
48	Kelurahan Melawai	527,093,890.00	610,410,890.00	(83,317,000.00)
49	Kelurahan Kramat Pela	882,491,590.00	934,789,340.00	(52,297,750.00)
50	Kelurahan Gunung	1,214,211,723.00	1,211,711,973.00	2,499,750.00
51	Kelurahan Selong	788,035,140.00	783,935,140.00	4,100,000.00
52	Kelurahan Rawa Barat	1,066,653,341.00	1,066,653,341.00	-
53	Kelurahan Senayan	1,103,689,137.00	1,103,689,137.00	-
54	Kecamatan Setiabudi	549,258,583.00	858,006,790.00	(308,748,207.00)
55	Kelurahan Karet Semanggi	1,120,093,525.00	1,120,093,525.00	-
56	Kelurahan Kuningan Timur	838,829,450.00	838,703,950.00	125,500.00
57	Kelurahan Karet Kuningan	526,896,510.00	526,896,510.00	-
58	Kelurahan Karet	399,269,050.00	1,272,728,250.00	(873,459,200.00)
59	Kelurahan Menteng Atas	840,548,170.00	840,548,170.00	-
60	Kelurahan Pasar Manggis	627,854,450.00	606,154,450.00	21,700,000.00
61	Kelurahan Guntur	635,138,380.00	909,167,630.00	(274,029,250.00)
62	Kelurahan Setia Budi	532,077,117.00	642,084,267.00	(110,007,150.00)
63	Kecamatan Tebet	420,271,170.00	566,684,170.00	(146,413,000.00)
64	Kelurahan Menteng Dalam	889,268,490.00	889,268,490.00	-
65	Kelurahan Tebet Barat	1,736,272,282.00	1,736,272,282.00	-
66	Kelurahan Tebet Timur	356,116,075.00	525,811,756.00	(169,695,681.00)
67	Kelurahan Kebon Baru	1,540,263,831.00	1,540,263,831.00	-
68	Kelurahan Bukit Duri	886,229,338.00	886,229,338.00	-
69	Kelurahan Manggarai Selatan	830,671,542.00	558,860,100.00	271,811,442.00
70	Kelurahan Manggarai	715,314,937.00	715,314,937.00	-
71	Kecamatan Cilandak	433,706,998.00	654,549,498.00	(220,842,500.00)
72	Kelurahan Lebak Bulus	744,935,963.00	706,639,713.00	38,296,250.00
73	Kelurahan Pondok Labu	725,487,795.00	704,741,795.00	20,746,000.00
74	Kelurahan Cilandak Barat	764,373,788.00	764,373,788.00	-
75	Kelurahan Gandaria Selatan	144,223,800.00	144,223,800.00	-
76	Kelurahan Cipete Selatan	673,654,583.00	673,654,583.00	-
Jumlah		75.030.318.384,00	77,700,539,586.00	(1,670,221,202.00)

**Lampiran 4 Rekapitulasi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No.	Nama PD/UKPD	Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA		Kenaikan/Penurunan
		31 Desember 2025	31 Desember 2024 (Audited)	
1	2	3	4	5
1	Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	349,855,283.00	(349,855,283.00)
2	Kecamatan Kebayoran Lama	-	-	-
3	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	-	-	-
4	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	-	-	-
5	Kelurahan Pondok Pinang	-	-	-
6	Kelurahan Cipulir	-	-	-
7	Kelurahan Grogol Selatan	-	69,094,500.00	(69,094,500.00)
8	Kelurahan Grogol Utara	-	-	-
9	Kecamatan Pesanggrahan	-	66,848,121.00	(66,848,121.00)
10	Kelurahan Pesanggrahan	-	-	-
11	Kelurahan Petukangan Selatan	94,170,000.00	94,170,000.00	-
12	Kelurahan Petukangan Utara	-	-	-
13	Kelurahan Ulujami	-	31,122,953.00	(31,122,953.00)
14	Kelurahan Bintaro	-	-	-
15	Kecamatan Pasar Minggu	-	-	-
16	Kelurahan Pasar Minggu	-	-	-
17	Kelurahan Jati Padang	-	-	-
18	Kelurahan Ragunan	-	-	-
29	Kelurahan Cilandak Timur	-	250,000.00	(250,000.00)
20	Kelurahan Kebagusan	-	-	-
21	Kelurahan Pejaten Barat	-	-	-
22	Kelurahan Pejaten Timur	-	446,459,865.00	(446,459,865.00)
23	Kecamatan Jagakarsa	29,751,115.00	29,751,115.00	-
24	Kelurahan Jagakarsa	522,154,000.00	522,154,000.00	-
25	Kelurahan Ciganjur	-	151,111,750.00	(151,111,750.00)
26	Kelurahan Srengseng Sawah	-	-	-
27	Kelurahan Lenteng Agung	-	-	-
28	Kelurahan Tanjung Barat	87,072,525.00	87,947,525.00	(875,000.00)
39	Kelurahan Cipedak	-	-	-
30	Kecamatan Mampang Prapatan	-	-	-
31	Kelurahan Tegal Parang	164,000,000.00	183,361,317.00	(19,361,317.00)
32	Kelurahan Mampang Prapatan	-	-	-
33	Kelurahan Pela Mampang	-	-	-
34	Kelurahan Kuningan Barat	-	-	-
35	Kelurahan Bangka	-	-	-

36	Kecamatan Pancoran	17,177,250.00	-	17,177,250.00
37	Kelurahan Pancoran	-	73,387,177.00	(73,387,177.00)
38	Kelurahan Duren Tiga	-	4,482,500.00	(4,482,500.00)
39	Kelurahan Kalibata	-	-	-
40	Kelurahan Rawa Jati	-	39,001,300.00	(39,001,300.00)
41	Kelurahan Pangadegan	-	15,035,000.00	(15,035,000.00)
42	Kelurahan Cikoko	-	547,813,571.00	(547,813,571.00)
43	Kecamatan Kebayoran Baru	-	84,500.00	(84,500.00)
44	Kelurahan Gandaria Utara	-	-	-
45	Kelurahan Cipete Utara	43,725,000.00	123,424,000.00	(79,699,000.00)
46	Kelurahan Pulo	-	61,669,480.00	(61,669,480.00)
47	Kelurahan Petogogan	-	-	-
48	Kelurahan Melawai	-	-	-
49	Kelurahan Kramat Pela	-	-	-
50	Kelurahan Gunung	-	-	-
51	Kelurahan Selong	-	117,417,440.00	(117,417,440.00)
52	Kelurahan Rawa Barat	85,394,500.00	99,609,500.00	(14,215,000.00)
53	Kelurahan Senayan	-	3,907,750.00	(3,907,750.00)
54	Kecamatan Setiabudi	-	-	-
55	Kelurahan Karet Semanggi	-	4,577,500.00	(4,577,500.00)
56	Kelurahan Kuningan Timur	-	38,056,020.00	(38,056,020.00)
57	Kelurahan Karet Kuningan	-	-	-
58	Kelurahan Karet	-	-	-
59	Kelurahan Menteng Atas	13,475,000.00	292,402,844.00	(278,927,844.00)
60	Kelurahan Pasar Manggis	-	9,000,000.00	(9,000,000.00)
61	Kelurahan Guntur	-	-	-
62	Kelurahan Setiabudi	-	-	-
63	Kecamatan Tebet	175,370,490.00	175,370,490.00	-
64	Kelurahan Menteng Dalam	17,756,700.00	17,756,700.00	-
65	Kelurahan Tebet Barat	122,284,925.00	122,284,925.00	-
66	Kelurahan Tebet Timur	-	-	-
67	Kelurahan Kebon Baru	6,996,000.00	121,398,186.00	(114,402,186.00)
68	Kelurahan Bukit Duri	17,231,500.00	13,271,500.00	3,960,000.00
69	Kelurahan Manggarai Selatan	-	30,187,620.00	(30,187,620.00)
70	Kelurahan Manggarai	88,678,000.00	88,678,000.00	-
71	Kecamatan Cilandak	-	-	-
72	Kelurahan Lebak Bulus	-	-	-
73	Kelurahan Pondok Labu	9,460,000.00	9,460,000.00	-
74	Kelurahan Cilandak Barat	-	86,285,876.00	(86,285,876.00)
75	Kelurahan Gandaria Selatan	-	-	-
76	Kelurahan Cipete Selatan	-	-	-
Jumlah		1,494,697,005.00	4,126,688,308.00	(2,631,991,303.00)